



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Blitar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP-D adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut dengan RPJM-D adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Jawa Timur.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman umum bagi :
 - a. Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan proses Pembangunan Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D).

Pasal 3

RPJP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Bupati berkewajiban menggunakan RPJP-D sebagai acuan dalam penyusunan RPJM-D dan acuan bagi Badan, Dinas, Kantor dan Bagian dalam menyusun Rencana Strategis.

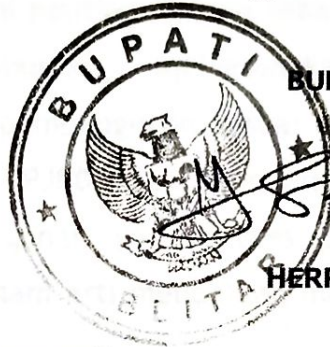
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 31 Desember 2008



BUPATI BLITAR

HERRY NOEGROHO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TGL 23 FEBRUARI 2009 NO 1/C TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar pada dasarnya adalah dokumen komprehensif dua puluh tahunan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar untuk setiap jangka waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJPD Kabupaten Blitar ini penting disusun sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh *stakeholders* terkait.

Di dalam RPJPD Kabupaten Blitar selain memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Blitar merupakan arahan atau pemandu bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Blitar yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi masa depan.

Secara garis besar, tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini adalah sebagai berikut: (1) Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar 2005-2025, (2) Merumuskan arah pembangunan jangka panjang dan indikator untuk menakar keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar, (3) Merumuskan kaidah pelaksanaan

program pembangunan di Kabupaten Blitar, (4) Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang, (5) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat, (6) Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Blitar secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (7) Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan per-lima tahunan.

RPJPD Kabupaten 2005-2025 ini telah berhasil disusun tepat waktu sudah tentu berkat dukungan dari pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah memberikan masukan untuk perbaikan RPJPD ini.
2. Seluruh Tim Penyusun RPJPD yang telah bekerja keras dan memberikan masukan dan kritik terhadap draft RPJPD.
3. Para pimpinan Satker di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
4. Seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kritik, masukan dan menyampaikan aspirasinya untuk melengkapi RPJPD ini.
5. Seluruh warga masyarakat yang telah memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar ini.

Kami berharap RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi lembaga perangkat daerah, *stakeholders*, pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan lima tahunan dan tahunan yang lebih terfokus dan kontekstual, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu: **TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG**

**MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, MAKMUR DAN RELIGIUS.**

Blitar, 31 Desember 2008

BUPATI BLITAR

H. HERRY NOEGROHO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Umum	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 3
C. Dasar Hukum	I - 4
D. Hasil yang Diharapkan	I - 5
E. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I - 6
F. Metode	I - 7
G. Proses Penyusunan	I - 8
H. Pola Pikir Penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar ..	I - 9
I. Sistematika RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025	I - 10
BAB II KONDISI, ANALISIS dan PREDIKSI KONDISI UMUM	II - 1
A. Kondisi Pada Saat ini	II - 1
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	II - 1
2. Demografi	II - 3
3. Kemiskinan	II - 4
4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam	II - 5
5. Pendidikan	II - 16
6. Agama	II - 19
7. Politik	II - 21
8. Pemerintahan dan Kinerja Birokrasi	II - 23
9. Sarana dan Prasarana	II - 29
10. Kesehatan	II - 30
11. UMKM	II - 32
B. Tantangan	II - 36
1. Kemiskinan	II - 36
2. Pendidikan	II - 37
3. UMKM	II - 39
4. Pertanian	II - 39
C. Modal Dasar	II - 42
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025	III - 1
A. Visi	III - 1
B. Misi	III - 2

BAB IV	ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS TAHUN 2005-2025 ..	IV - 1
	A. Arah Kebijakan Pembangunan	IV - 1
	B. Tahapan dan Skala Prioritas	IV - 29
BAB V	PENUTUP: PRASYARAT DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAMIN EFEKTIVITAS RPJPD KABUPATEN BLITAR 2005-2025 ..	V - 1
	A. Kaidah dan Dukungan yang Dibutuhkan	V - 2
	B. Prasyarat	V - 3

DAFTAR GAMBAR

I.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I - 6
I.2	Pola Pikir Penyusunan RKPJD Kabupaten Blitar	I - 9

DAFTAR GRAFIK

II.1	Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Blitar	II-28
II.2	Komposisi PNS Kabupaten Blitar Berdasar Golongan/Pangkat	II-28
II.3	Komposisi PNS Kabupaten Blitar Berdasar Eseloning	II-29

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Di era otonomi daerah, salah satu prasyarat penting yang harus dimiliki dan disiapkan setiap daerah adalah perencanaan pembangunan. Per definisi, perencanaan sesungguhnya adalah suatu penanganan masalah secara holistik. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan sering berarti penetapan tujuan dan prioritas serta serangkaian kegiatan untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien, lebih dari itu perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat menemukan masa depannya.

Sebagai salah satu daerah yang sedang membangun, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar jelas mustahil dapat berkembang secara terarah tanpa didukung dan dipandu dengan dokumen perencanaan yang sistematis dan bersifat kontekstual. Seperti telah dinyatakan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pertunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki setiap daerah adalah RPJPD. Makna RPJPD ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan umum bagi pelaksanaan proses pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan berbagai dinas, badan, lembaga lain, dan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Blitar, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

Secara lebih rinci, yang dimaksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar pada dasarnya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar untuk setiap jangka waktu lima tahunan. RPJPD Kabupaten Blitar ini penting disusun sebagai acuan dan arahan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan berbagai program pembangunan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat makro, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif, dalam arti melibatkan masukan dan dukungan dari seluruh unsur pelaku pembangunan serta *stakeholders* terkait. Di dalam RPJPD Kabupaten Blitar selain memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang, juga sekaligus indikator yang dapat dijadikan acuan untuk menilai seberapa jauh pembangunan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan kata lain, RPJPD Kabupaten Blitar merupakan arahan atau pemandu bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Blitar yang demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, sejak awal telah disadari bahwa hakekat pembangunan sesungguhnya adalah suatu proses perubahan sosial-ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan pembangunan, perubahan tentu tidak diharapkan hanya bersifat *instant* dan terjadi pada aspek fisik serta kelembagaan saja, tetapi juga perubahan jangka

panjang pada taraf kesejahteraan dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Pembangunan, pemberdayaan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang benar-benar nyata adalah hakekat perubahan yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil mengurangi jumlah orang miskin atau berhasil menyediakan jalan mulus, membangun gedung-gedung sekolah, jembatan yang kokoh atau membangun berbagai prasarana ekonomi. Namun, juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat setempat untuk membangun perekonomian rakyat yang kokoh dan tangguh, serta mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan —baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan umum bagi pelaksanaan proses pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan berbagai dinas, badan, lembaga lain, dan seluruh *stakeholders* di Kabupaten Blitar, serta sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Sedangkan, tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar 2005-2025.
2. Merumuskan arah pembangunan jangka panjang dan indikator untuk menakar keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar.
3. Merumuskan kaidah pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Blitar.
4. Mengakomodasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar dalam proses perencanaan program pembangunan jangka panjang.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat.
6. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Blitar secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Menjaga kesinambungan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar yang dilaksanakan per-lima tahunan.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar 2005-2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);

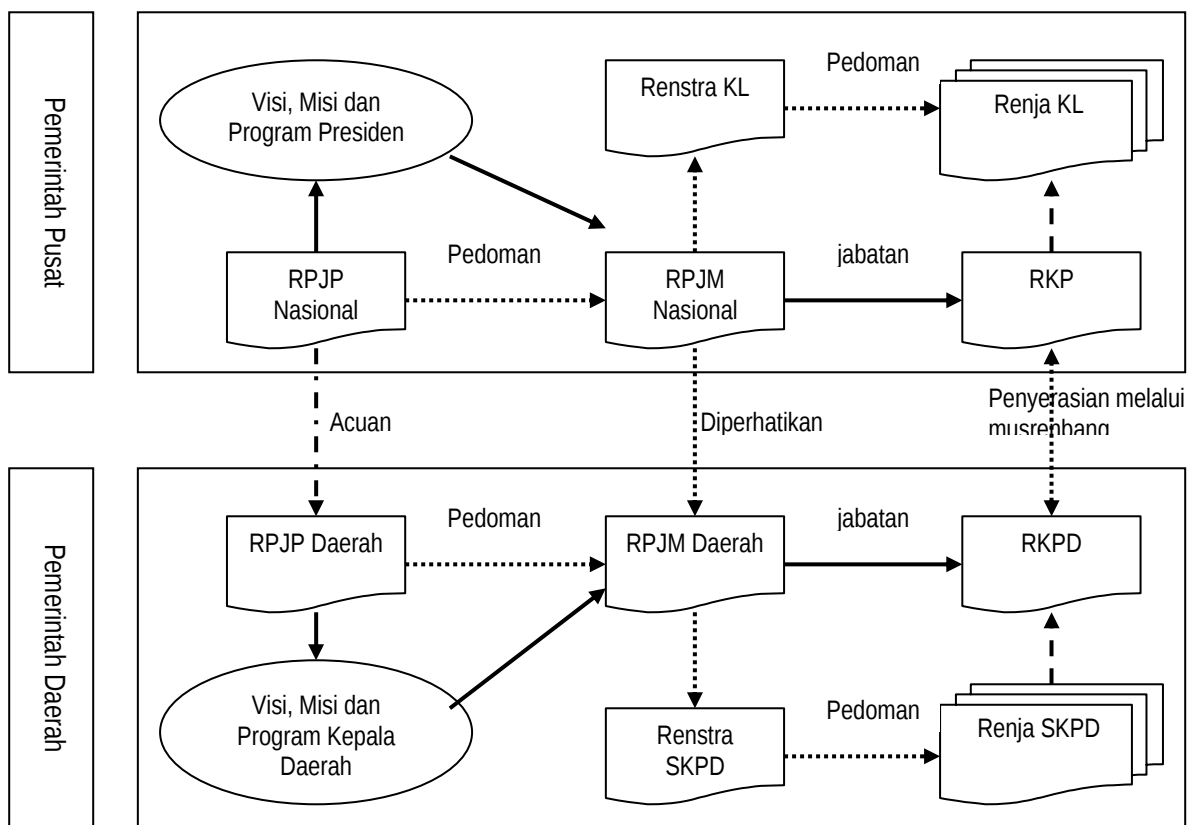
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
8. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 ini adalah:

1. RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 yang benar-benar kontekstual, namun tetap serasi dengan RPJPD Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.
2. RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar.

E. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Gambar I.1

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Blitar mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 mengacu pada RPJPD Nasional dan RPJPD Propinsi Jawa Timur.
2. RPJMD Kabupaten Blitar merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

F. METODE

Kegiatan penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini pada dasarnya telah dilakukan secara *bottom-up*, dalam arti selama proses penyusunannya telah dibuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh partisipasi masyarakat, DPRD, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dinas terkait, dan *stakeholders* yang lain untuk memberikan masukan demi kesempurnaan dokumen yang disusun.

Metode yang dikembangkan untuk mencari masukan dan data bagi upaya penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini, secara garis besar ada dua, yaitu:

1. *Future Search Conference*, yakni sebuah metode yang mencoba menetapkan tujuan ideal jangka panjang yang ingin dicapai terlebih dahulu, baru kemudian merumuskan strategi dan cara yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan itu. Metode ini tepat dipergunakan untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, sebab dengan cara ini terbukti dapat dirumuskan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Blitar yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.
2. *Focus Group Discussion* (FGD), yakni metode kelompok diskusi terbatas yang dimanfaatkan untuk menggali informasi tertentu yang lebih terfokus, sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan isu prioritas, arah, kebijakan dan indikator pencapaian program pembangunan yang lebih detail dan akurat.

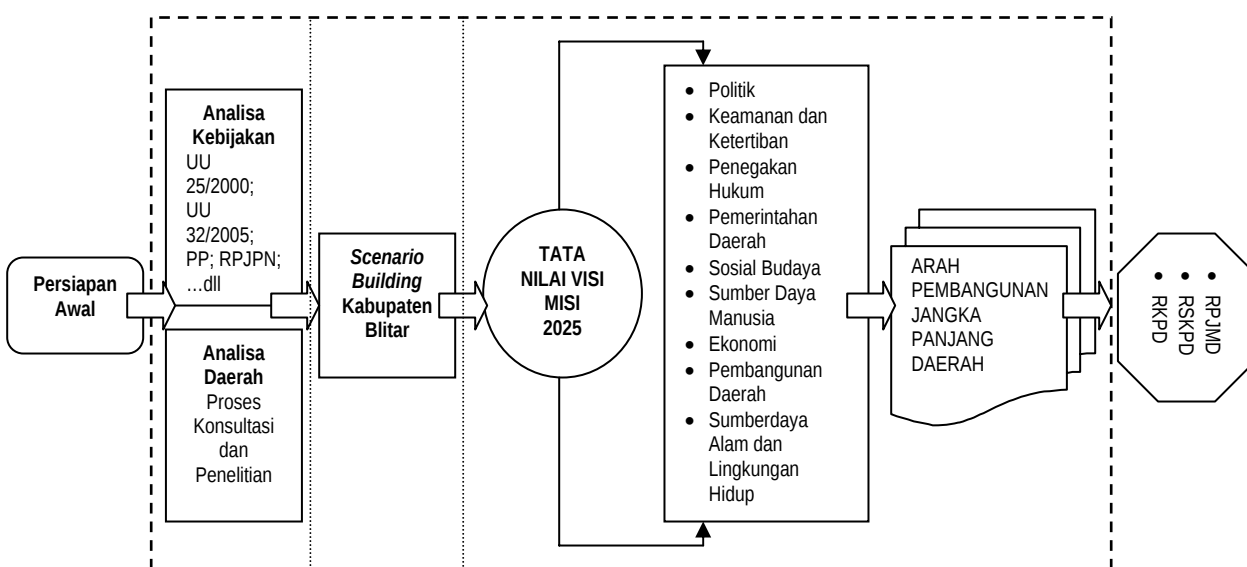
G. PROSES PENYUSUNAN

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, secara garis besar telah ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Langkah Pertama**, persiapan awal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang, melakukan serangkaian konsultasi untuk menemukan inisiatif baru, mempersiapkan kerangka konseptual, dan mempersiapkan sumber daya manusia, material dan finansial.
2. **Langkah Kedua**, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan strategis Kabupaten Blitar, *scenario building* Kabupaten Blitar, risalah dialog publik, hasil kajian, opini publik, hasil lokakarya perencanaan strategis, dan hasil temu *stakeholders* Kabupaten Blitar. Yang dimaksud *Scenario Building* adalah metode untuk merangsang pemikiran tentang berbagai kemungkinan masa depan berdasarkan fokus pada kekuatan-kekuatan signifikan yang bermakna. Skenario merupakan media pembelajaran publik dengan dua sasaran utama. Sasaran pertama, ditujukan pada level individu, di mana peran skenario di sini merupakan alat bantu kognitif untuk melakukan penilaian terhadap kinerja daerah, alat bantu untuk membangun persepsi tentang masa depan daerah dan menjadi media refleksi untuk menemukan jalan alternatif menuju masa depan daerah yang lebih baik. Sasaran kedua ditujukan pada level kelompok, di mana peran skenario di sini adalah sebagai bahasa bersama untuk menggali berbagai pandangan tentang masa depan pembangunan daerah.
3. **Langkah Ketiga**, membangun kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Blitar dan pemerintah untuk menyusun RPJPD Kabupaten Blitar yang komprehensif, aspiratif, berwawasan masa depan dan kontekstual dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Blitar.

4. **Langkah keempat**, menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, yakni forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disusun, di bawah koordinasi Ketua Bappeda Kabupaten Blitar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan komitmen para pemangku-kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025.
5. **Langkah Kelima**, menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang melibatkan pemerintah, DPRD Kabupaten Blitar, tim ahli dan *stakeholders*.
6. **Langkah Keenam**, penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025.

H. POLA PIKIR PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN BLITAR



Gambar I.2

I. SISTEMATIKA RPJPD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025

Secara garis besar, sistematika isi dari RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Hasil yang Diharapkan
- E. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
- F. Metode
- G. Proses Penyusunan
- H. Pola Pikir Penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar
- I. Sistematika RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025

BAB II : KONDISI UMUM

- A. Kondisi Pada Saat Ini
- B. Tantangan
- C. Modal Dasar

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

- A. Arah Kebijakan Pembangunan
- B. Tahapan dan Skala Prioritas

BAB V : PENUTUP

- A. Kaidah dan Dukungan yang Dibutuhkan
- B. Prasyarat

BAB II

KONDISI , ANALISIS, dan PREDIKSI KONDISI UMUM

A. KONDISI SAAT INI

Sejak kebijakan otonomi daerah digulirkan, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk menata kembali dan merevitalisasi efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, harus diakui bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan umumnya masih belum sepadan dengan besaran masalah yang dihadapi.

Ke depan, agar upaya untuk membangun Kabupaten Blitar dan mensejahterakan masyarakat Blitar dapat dilakukan dengan maksimal dan lebih terarah, selain perlu terlebih dahulu dipahami kondisi dan potensi yang dimiliki, yang tak kalah penting adalah bagaimana merancang program yang benar-benar tepat dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki hingga dapat dicapai hasil yang benar-benar maksimal dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Blitar.

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan salah satu dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang terletak di kawasan Selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Sebagai salah satu wilayah pantai, Blitar terkenal dengan kekayaan lautnya. Wilayah yang menjadi tetangga bagian Timur adalah kabupaten Malang, sementara bagian Barat kabupaten Tulungagung serta bagian Utara adalah kabupaten Kediri dan Malang. Kabupaten Blitar berjarak kira-kira 160

km dari ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Dalam keadaan normal dari Surabaya Kabupaten Blitar dapat ditempuh kira-kira 4 jam.

Kendati berbatasan dengan Samudra Indonesia, kabupaten Blitar memiliki ketinggian kurang lebih 167 meter di atas permukaan air laut. Luas kabupaten Blitar 1.588,79 km². Kecamatan terluas adalah Wonotirto, yaitu 171,63 km², sebaliknya kecamatan paling sempit adalah Sanankulon, yaitu 33,33 km². beberapa kecamatan berada di atas ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan tertinggi adalah Wates, berada pada ketinggian 420 meter di atas permukaan laut. Sementara itu kecamatan Wonotirto berada pada ketinggian 387 meter di atas permukaan laut.

Dilihat dari struktur kesuburan tanahnya, ternyata tidak seluruh wilayah memiliki karakteristik yang sama. Di kabupaten Blitar secara garis besar dibagi menjadi dua oleh sungai Brantas, yang berada di sebelah Selatan seluas 689,85 kilometer persegi dan sebelah Utara seluas 898,94 kilometer persegi.

Kedua wilayah ini memiliki karakteristik tingkat kesuburan yang berbeda. Wilayah yang berada di bagian Selatan memiliki karakteristik kurang subur. Di wilayah ini memang didominasi oleh kawasan pegunungan yang berbatu. Sebagian besar wilayah pegunungan ini berkapur sehingga cenderung tandus yang berakibat sangat sulit ditanami.

Sementara itu di wilayah bagian utara memiliki karakteristik tanah yang bertolak belakang dari bagian Selatan. Di wilayah Utara tanahnya dikenal memiliki kesuburan, sehingga berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik. Karena itu di bagian Utara ini dikenal sebagai wilayah yang surplus dapat menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Salah satu pendukung kesuburan tanah yang berada di wilayah Utara ini adalah keberadaan gunung Kelud yang masih aktif. Di samping itu didukung dengan adanya aliran sungai yang jumlahnya relatif banyak. Di kabupaten Blitar paling tidak terdapat sekitar 32 aliran sungai yang menjadi penopang semakin suburnya areal pertanian.

Dengan demikian berbagai tanaman yang membutuhkan air tidak sampai kekurangan sehingga dapat berkembang dengan subur.

Di kabupaten Blitar terdapat sebanyak 22 kecamatan yang terbagi menjadi sebanyak 248 desa/kelurahan, dengan rincian 220 adalah berstatus desa dan 28 adalah kelurahan. Sedangkan jumlah dusun/ RW sebanyak 759 dan jumlah RT sebanyak 6.978. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Srengat, yaitu sebanyak 16 desa/kelurahan.

Secara umum kondisi geografi kabupaten Blitar dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Rata-rata curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 583 mm. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curah hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2004 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Desember, yaitu 23.916 mm. Pada bulan Januari turun menjadi 13.890 mm.

Sementara dilihat dari banyaknya hari hujan per bulan, selama 10 tahun terakhir secara umum tidak banyak perubahan. Jumlah hari hujan paling dominan terjadi pada bulan Oktober- April. Pada tahun 2004 jumlah hari hujan paling banyak terjadi pada Desember, yaitu 19. Sementara jumlah hari hujan terendah pada tahun yang sama terjadi pada Juni, Juli dan Agustus, masing-masing 1 hari.

2. Demografi

Di berbagai wilayah masalah kependudukan merupakan aspek penting dalam berjalannya pemerintahan. Penting dalam pengertian bahwa aspek kependudukan merupakan unsur dalam pembangunan baik sebagai obyek maupun subyek. Karena itu pengetahuan tentang aspek-aspek kependudukan akan memberi manfaat yang cukup besar. Data kependudukan merupakan informasi penting yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Perkembangan kependudukan akan mempunyai dampak yang luas di berbagai

bidang seperti pangan, kesehatan, pendidikan keamanan dan sebagainya. Berbagai aspek yang perlu mendapat perhatian misalnya menyangkut jumlah, komposisi baik menurut umur atau jenis kelamin.

Pada tahun 2004 penduduk di kabupaten Blitar menunjukkan angka sebanyak 1.111.957 jiwa yang terdiri dari 558.019 jiwa laki-laki dan 553.938 jiwa perempuan. Dilihat dari angka kepadatannya, di kabupaten Blitar menunjukkan angka sebesar 700 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2004.

Per kecamatan, pada tahun 2004 angka kepadatan tertinggi terdapat di Sanankulon, yaitu sebesar 1.436 jiwa per kilometer persegi, kemudian terpadat kedua adalah Talun sebesar 1.159 jiwa per kilometer persegi. Terpadat ketiga di Kabupaten Blitar adalah kecamatan Srengat, yaitu sebesar 1.094 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya kecamatan yang tergolong paling jarang di kabupaten ini adalah Wonotirto, yaitu sebesar 239 jiwa per kilometer persegi dan kecamatan Bakung sebesar 265 jiwa per kilometer persegi.

Program-program pengendalian kependudukan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui dinas-dinas terkait yang berwenang terutama Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBBS). Melalui Badan KBKS upaya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk dilakukan. Program-program yang dilakukan antara lain menurunkan angka Pasangan Usia Subur (PUS), sementara di sisi lain meningkatkan peserta KB.

3. Kemiskinan

Di bidang kemiskinan dalam jangka waktu lima tahun terakhir angkanya semakin menurun. Data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur 2005, pada tahun 2005 menunjukkan angka presentase penduduk kabupaten Blitar masih sebesar 14,65% (sebanyak 166.354 jiwa) . Dilihat dari angka ini maka kondisi penduduk miskin kabupaten Blitar lebih kecil dibanding dengan Jawa Timur. Pada tahun yang sama angka penduduk miskin di Jawa Timur masih sebesar 22,51%.

Masalah penduduk miskin memang menjadi persoalan tersendiri bagi Kabupaten Blitar. Tujuan jangka panjang pembangunan tidak hanya semakin meminimalkan jumlah penduduk miskin tetapi menjadikan sejahtera, mandiri dan berdaya. Dengan segala potensi yang dimiliki dan pengelolaan yang memihak pada masyarakat bukan tidak mungkin apa yang menjadi visi kepala daerah akan tercapai.

Membicarakan jumlah penduduk miskin tidak bisa dilepaskan dari kontribusi masing-masing bidang/sektor PDRB kabupaten Blitar. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan sebaran pendapatan perkapita penduduk.

4. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Penggunaan tanah di kabupaten Blitar mencapai 48,17% dari luas Kabupaten Blitar 158,8 Km² merupakan areal pertanian yang terdiri dari persawahan, tegalan dan perkebunan. Pada tahun 2004 lahan sawah mencapai seluas 31.704 ha (19,96%). Dibanding tahun sebelumnya (2003) luas areal sawah mengalami penurunan. Pada tahun 2003 areal sawah mencapai seluas 31,706 ha.

Dilihat dari sistem pengairan lahan sawah terbagi menjadi pengairan teknis seluas 21.456 ha (67,68%), setengah teknis mencapai seluas 3.605 ha, sederhana mencapai seluas 4.854 ha dan 1.093 ha adalah tadah hujan. Luas areal sawah yang menggunakan sistem pengairan teknis cenderung mengalami penyusutan. Pada tahun 2000 misalnya areal sawah dengan sistem pengairan teknis mencapai seluas 21.170 ha.

Dibanding dengan sistem pengairan teknis maka sawah tadah hujan tidak mudah untuk mengatur pola tanamnya. Pola tanam sawah tadah hujan tergantung pada musim. Ketika musim hujan maka tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman yang memang membutuhkan banyak air.

Sebaliknya ketika musim kemarau maka tanaman yang di usahakan adalah tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Beberapa

kecamatan yang terdapat areal sawah tadah hujan adalah Wates (419 ha), Kademangan (181 ha), Panggungrejo (154 ha), Ponggok (149 ha), Wonotirto (118 ha), Sutojayan (37 ha), Selorejo (23 ha) dan Wonodadi (10 ha).

Lahan bukan sawah terdiri dari pekarangan, bangunan dan halaman, tegal/kebun, padang rumput, rawa, tambak, kolam, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Komposisi penggunaan lahan tanah bukan sawah paling tinggi adalah untuk tegal/kebun, yaitu seluas 44.808 ha. Dibanding dengan lima tahun sebelumnya (2000) penggunaan areal tanah untuk tegal/kebun mengalami kenaikan 1.946 ha. Sementara itu areal tanah untuk pekarangan, bangunan dan halaman juga menunjukkan gejala yang sama, yaitu mengalami kenaikan. Dibanding lima tahun sebelumnya (2000), penggunaan areal tanah bukan sawah mengalami kenaikan sebesar 67 ha.

Berkaitan dengan penggunaan lahan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana mempertahankan tingkat kesuburan tanah karena terjadinya gradasi kualitas kesuburan tanah sebagai akibat dari pengolahan lahan/tanah yang tidak tepat terutama berkaitan dengan pemupukan, pola tanam dan penggunaan lahan itu sendiri.

Areal hutan di kabupaten Blitar pada tahun 2004 seluas 36.570,6 hektar. Sementara penggunaan lahan untuk hutan negara secara statistik selama lima tahun tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 34.969,6 ha. Di Kecamatan Wonotirto terdapat kawasan hutan negara paling luas dibanding kecamatan lainnya. Di kecamatan Wonotirto terdapat seluas 4.547,5 ha hutan negara. Sementara itu di Kecamatan Panggungrejo terdapat seluas 4.152,5 ha hutan negara. Sebaliknya di beberapa kecamatan tidak terdapat kawasan hutan, seperti Kanigoro, Talun, Srengat, Wonodadi atau Udanawu.

Tetapi areal lahan untuk hutan rakyat pada tahun 2004 justru mengalami penurunan dibanding tahun 2000. Pada tahun 2004 luas areal lahan hutan rakyat mencapai 1.601 ha, sementara pada tahun 2000 seluas 1.950 ha. Kawasan hutan rakyat paling luas terdapat di kecamatan Wonotirto, yaitu 436 ha, sementara di kecamatan Binangun seluas 334 ha. Semakin menurunnya

kawasan hutan membutuhkan perhatian tersendiri dari pihak yang berwenang. Gundulnya kawasan hutan semakin membuka peluang munculnya tanah longsor, atau bahaya banjir.

Lahan kritis di kabupaten Blitar hingga tahun 2005 masih belum tertangani dengan tuntas. Hingga tahun 2005 di kabupaten Blitar masih ada lahan kritis seluas 15.907 hektar. Tetapi tekad kabupaten Blitar untuk mengurangi lahan kritis sangat kuat, sehingga diharapkan pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi dan tergantikan dengan hutan rakyat.

Sepanjang tahun 2003-2005 di kabupaten terjadi penurunan lahan kritis seluas 9.810 hektar (38,2%) atau rata-rata turun 12,73% pertahun melalui program GERHAN. Sisanya seluas 15.907 hektar (61,8%) ditangani antara tahun 2006-2009. Diperkirakan pada tahun 2009 hanya terdapat seluas 3.021 hektar.

Selain itu, areal tanah digunakan untuk perkebunan. Kecenderungan yang sama, yaitu semakin menurunnya areal kawasan perkebunan. Hanya saja penurunan lahan untuk perkebunan terjadi setelah tahun 2003. Pada tahun 2003 areal perkebunan seluas 14.693 ha, sementara pada tahun 2004 menurun menjadi 14.135 ha. Kawasan perkebunan paling luas juga terdapat di kecamatan Wonotirto, yaitu seluas 4.858 ha

Areal tanah dengan berbagai penggunaannya menghasilkan berbagai macam tanaman, termasuk di dalamnya untuk bahan makanan. Bahan makanan yang dihasilkan di kabupaten Blitar seperti adalah padi, jagung, ketela, karang tanah dan kedelai. Dari berbagai macam tanaman bahan makanan, tanaman padi paling luas areal tanam maupun panen. Areal tanam padi sawah pada tahun 2004 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (2003). Pada tahun 2004 areal tanam padi sawah seluas 47.344 ha, sementara pada tahun 2003 seluas 51.133 ha.

Kendati areal tanam padi sawah mengalami penurunan pada tahun 2004 dibanding tahun 2003, tetapi dari segi luas panen justru semakin meningkat.

Pada tahun 2004 areal panen padi sawah seluas 45.429 ha, sementara pada tahun 2003 seluas 43.774 ha.

Produksi tanaman bahan makanan di kabupaten Blitar pada tahun 2004 secara umum mengalami kenaikan kecuali pada tanaman padi. Pada tahun 2004 produksi tanaman padi kering mengalami penurunan sebesar 2,86% dibanding tahun 2004. Pada tahun 2004 produksi padi mencapai 257.853 ton, sementara pada tahun 2003 mencapai sebanyak 265.427 ton. Gejala yang sama juga – mengalami penurunan-- terjadi pada produksi padi ladang. Pada tahun 2004 produksi padi kering dari ladang sebanyak 10.591 ton, sementara pada tahun 2003 mencapai sebanyak 12.057 ton. Terlihat produksi padi ladang mengalami penurunan sebesar 12,16% dari tahun 2003 ke tahun 2004.

Produksi tanaman jagung mengalami gejala fluktuatif. Tetapi dibanding tahun 2000, produksi tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 produksi jagung sebanyak 190.006 ton, sementara pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 264.073 ton. Produktifitas jagung pada tahun 2003 sebesar 55,47 kw/ha, sementara pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebesar 62,63 kw/ha.

Rata-rata produksi ketela pohon selama lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2000 rata-rata produksi ketela pohon sebesar 194,42 kw/ha, sementara pada tahun 2004 menurun menjadi sebesar 140,37 kw/ha. Sedangkan produksi ubi jalar pada tahun 2000 sebanyak 109.417 ton, sementara pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi sebanyak 73.081 ton. Pada sisi lain, produksi kedelai justru mengalami kenaikan dibanding tahun 2003. Pada tahun 2003 produksi kedelai biji kering sebanyak 4.986 ton menjadi sebanyak 11.715 ton. Sementara itu rata-rata produksi kedelai biji kering pada tahun 2003 sebesar 4,8 kw/ha mengalami kenaikan menjadi sebesar 10,12 kw/ha.

Luas panen kelompok sayuran secara umum dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif. Dalam waktu lima tahun terakhir, luas panen kelompok

sayuran paling tinggi adalah cabe. Tetapi luas panen cabe mengalami penurunan dibanding lima tahun sebelumnya (2000). Pada tahun 2004 luas panen cabe 3.229 ha, sementara tahun 2000 seluas 1.767 ha.

Rata-rata produksi cabe besar pada tahun 2004 mencapai sebesar 281,02 kw/ha, sementara rata-rata produksinya sebanak 182.664 kw. Sedangkan rata-rata produksi cabe kecil sebesar 50,55 kw/ha. Produksi cabe kecil pada tahun 2004 sebanyak 130.370 kw. Kelompok tanaman sayuran yang juga termasuk menghasilkan produksi yang cukup tinggi adalah tomat. Pada tahun 2004 produksi tanaman tomat mencapai sebanyak 106.793 kw dengan luas panen 398 ha. Sementara itu rata-rata produksi tomat mencapai 268,32 kw/ha.

Buah rambutan bagi kabupaten Blitar merupakan salah satu produk unggulan. Dilihat dari kuantitas pohonnya, tanaman buah rambutan dalam waktu lima tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2000 pohon rambutan di kabupaten Blitar sebanyak 240.710 buah, sementara tahun 2004 meningkat menjadi 281.535 buah. Seluruh wilayah kecamatan di kabupaten Blitar tidak lepas dari tanaman buah rambutan kecuali kecamatan Bakung.

Tetapi dalam lima tahun terakhir jumlah pohon nanas terus menerus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 jumlah pohon nanas sebanyak 184.323.255 batang, sementara pada tahun 2004 semakin menurun menjadi 153.945.461 batang. Wilayah kecamatan paling banyak terdapat di Ponggok, sebanyak 141.000.000 batang. Penurunan ini terjadi karena perubahan jenis tanaman yang dibudidayakan sehingga secara signifikan memberikan dampak penurunan terhadap produksi tanaman nanas.

Sementara itu beberapa kecamatan yang membudidayakan tanaman nanas seperti Nglegok sebanyak 11.505.750 batang, Udanawu sebanyak 1.314.416, Srengat sebanyak 95.500 batang, Wonodadi sebanyak 11.632 batang, Talun sebanyak 7.800 batang, Gandusari sebanyak 4.664 batang, Kanigoro sebanyak

2.5200 batang, Garum sebanyak 2.545 batang dan Selorejo sebanyak 634 batang.

Tanaman obat-obatan paling luas areal panen adalah kencur, sebanyak 85.574 meter persegi. Tanaman obat yang tergolong luas antara lain sebanyak 66.641 meter persegi, kunyit sebanyak 63.558 meter persegi dan jahe seluas 58.150 meter persegi. Rata-rata produksi kencur paling banyak diantara tanaman obat lainnya, yaitu sebanyak 226.008 kw.

Sumber daya yang juga banyak dikuasai oleh penduduk kabupaten Blitar adalah ikan air tawar. Produksi ikan air tawar yang berasal dari kolam pekarangan terdapat di semua kecamatan di kabupaten Blitar. Kendati demikian dibanding dengan lima tahun sebelumnya, jumlah produksi ikan air tawar mengalami penurunan. Pada tahun 2000, jumlah produksi ikan air tawar yang berasal dari kolam pekarangan sebanyak 2.477.888 kg, sementara pada tahun 2004 menurun menjadi sebanyak 1.567.625 kg.

Komoditi peternakan terbesar di kabupaten Blitar adalah ayam ras petelur. Kendati ada wabah flu burung ternyata populasi jumlah ayam ras petelur dalam jangka waktu lima tahun (2001-2005) tidak mengalami penurunan. Tetapi sebaliknya jumlah ayam ras petelur justru mengalami kenaikan. Tahun 2001 jumlah ayam ras petelur sebanyak 8.105.726 ekor. Pada tahun berikutnya meningkat menjadi sebanyak 13.750.300 ekor. Pada tahun 2003 meningkat menjadi sebanyak 14.007.425 ekor, tahun 2004 meningkat menjadi 14.048.595 ekor dan tahun 2005 sebanyak 14.180.000 ekor.

Selain ayam ras petelur, jumlah ayam buras secara statistik juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 jumlah ayam buras berjumlah 2.255.353 ekor, Sementara pada tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 2.345.107 ekor. Demikian juga populasi ayam ras pedaging dalam jangka waktu lima tahun terakhir tidak mengalami penurunan, sebaliknya mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 jumlah ayam ras pedaging sebanyak 633.000 ekor, sementara pada tahun 2004 meningkat menjadi 665.000 ekor.

Di Kabupaten Blitar produksi daging dalam waktu lima tahun terakhir (2001-2005) terlihat fluktuatif. Pada tahun 2001 misalnya menghasilkan daging sebanyak 2.652 ton. Pada Tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 2.654,323 ton. Pada tahun berikutnya tetap mengalami kenaikan menjadi sebanyak 2.681,640 ton. Tetapi pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.269,693 ton. Pada tahun 2005 menanjak naik kembali menjadi 2.718,564 ton. Produksi daging pada tahun 2001-2003 ternyata paling banyak berasal dari ternak sapi, sementara pada tahun 2004-2005 tidak lagi mendominasi. penghasil daging pada tahun 2004-2005 didominasi oleh ayam pedaging.

Sumberdaya alam yang ada di kabupaten Blitar termasuk di dalamnya hasil-hasil kekayaan alam ditambah dengan hasil dari peternakan berpengaruh terhadap kondisi perekonomiannya. Terobosan yang terkait dengan peternakan telah mengantarkan kabupaten Blitar mendapat award dari Jawa Pos Pro Otonomi pada tahun 2006. Kabupaten Blitar, karena kebijakannya dalam melindungi sumber perekonomian utama, yaitu peternakan penghasil telur dan susu. Di kabupaten Blitar dikembangkan Pos Kesehatan Hewan di 22 kecamatansehingga Flu burung berhasil ditangani dengan baik. Dinas peternakan membentuk kemitraan inti plasma antar peternak. Kelembagaan ini yang dapat menangkal atau menyelamatkan peternak dari kebangkrutan masal. Selain itu kabupaten Blitar tidak memungut retribusi sepeserpun dari produk susu dan telur. Sebaliknya pemerintah kabupaten Blitar mengupayakan peternak memperoleh berbagai fasilitas dari dinas yang ada.

Sebagai gambaran sumbangan PDRB Sektor Pertanian pada tahun 1996-2001 kendati sektor pertanian memberikan sumbangan paling besar dibanding sektor lainnya, ternyata dari tahun ke tahun dari segi jumlah mengalami penurunan. Misalnya tahun 1996 sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 45,20% tahun 1997 sebesar 44,23%, tahun 1998 sebesar 42,66%, tahun 1999 sebesar 42,84% dan tahun 2000 sebesar 41,26%.

Gejala penurunan produktifitas di sektor pertanian barangkali tidak hanya terjadi di kabupaten Blitar tetapi juga di tempat-tempat lainnya. Salah satu penyebabnya adalah semakin sempitnya lahan-lahan pertanian produktif. Semakin hari semakin banyak tanah-tanah produktif tidak dapat lagi menghasilkan produksinya bukan karena kehilangan kesuburannya. Tetapi tanah-tanah yang masih produktif semakin banyak yang beralih fungsi. Tanah-tanah produktif tidak lagi diolah dan ditanami tanaman pertanian atau perkebunan tetapi tak sedikit berubah menjadi areal perumahan, perkantoran, pertokoan atau pabrik.

Tetapi pada tahun 2001 hingga 2004 sumbangan PDRB Sektor Pertanian justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 PDRB Atas harga Berlaku mencapai sebesar Rp 1.596.082,36 juta, tahun berikutnya meningkat menjadi Rp 1.799.233,33 juta, tahun 2003 mencapai sebesar Rp 2.007.364,50 juta dan tahun 2004 meningkat menjadi Rp 2.201.339,56 juta.

Data statistik menunjukkan angka PDRB di kabupaten Blitar atas dasar harga berlaku mulai tahun 2001 hingga tahun 2005 terlihat mengalami kenaikan. Tahun 2001 angka PDRB menunjukkan angka sebesar Rp 3.157.618,23 juta, berturut-turut kemudian Rp 3.549.973,39 juta pada tahun 2002, sebesar Rp 3.990.804,52 juta pada tahun 2003 dan sebesar Rp 4.478.222,38 juta pada tahun 2004. Data Analisis Indikator Makro Propinsi Jawa 2005, bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2005 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten sebesar Rp 7.067,55 miliar.

Secara detail terlihat bahwa setiap sektornya tidak memberikan sumbangan seragam, yang besar tetapi sebaliknya ada yang kecil. Pada sektor-sektor tertentu memberikan sumbangan yang cukup besar pada tahun tertentu tetapi pada tahun yang lain mengalami penurunan atau sebaliknya peningkatan. Pada tahun 2004 terlihat sumbangan paling besar berasal dari pertanian. Kemudian di susul sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor

jasa-jasa dan paling kecil sumbangan PDRB-nya adalah listrik, gas dan air bersih.

Menentukan angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah didasarkan pada PDRB atas dasar harga konstan. Menghitung angka pertumbuhan ekonomi maka syaratnya harus menghilangkan faktor kenaikan harga barang dan jasa. Berdasarkan data statistik terlihat angka pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar pada tahun 1995 sebesar 6,21%, tahun 1996 sebesar 6,31%, tahun 1997 sebesar 4,17%, tahun 1998 sebesar minus 0,04%, tahun 1999 sebesar 1,57% dan tahun 2000 sebesar 2,32%.

Tahun-tahun berikutnya angka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar terus menanjak naik. Data yang ditunjukkan Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2005, angka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,64%. Pada tahun-tahun berikutnya angka laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Blitar semakin meningkat. Pada tahun 2002 angka laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,81%. Tahun 2003 semakin meningkat menjadi sebesar 4,82%. Sementara itu tahun 2004 melesat menjadi sebesar 5,60%. Tetapi pada tahun 2005 angka pertumbuhan mengalami penurunan menjadi sebesar 5,48%.

Sumber pendapatan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMN dan lain-lain Pendapatan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun terakhir (2001-2005) cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2001 PAD kabupaten Blitar mencapai sebesar Rp 12.372.877.988,-. Tahun 2002 meningkat menjadi Rp 17.913.736.807,-. Berturut-turut tahun 2003 sebesar Rp 21.761.008.786,-. Tahun 2004 meningkat dibanding tahun 2003, menjadi sebesar 22.222.398.703,45,- dan tahun 2005 menjadi sebesar 27.867.312.470,68,-. Sementara itu rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten Blitar sebesar 23,45%

Antara tahun 2001-2003, sumber PAD paling tinggi adalah pada penerimaan lain-lain Pendapatan. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 terjadi perubahan sumber dominan PAD. Pada tahun 2004 dan 2005, sumber

pendapatan PAD paling tinggi justru pada Retribusi Daerah. Pada tahun 2004 penerimaan dari Retribusi Daerah mencapai sebesar Rp 13.823.527.396,-, sementara pada tahun 2004 penerimaan dari Retribusi Daerah semakin meningkat menjadi Rp 15.460.430.564,-. Sedangkan rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah mencapai sebesar 63,22%.

Sementara itu Pendapatan Daerah juga berasal dari pemasukan Dana Perimbangan. Pemasukan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus/Bantuan Pembangunan, Dana Darurat dan Dana Perimbangan dari Propinsi. Dalam lima tahun terakhir kecenderungan penerimaan dari Dana Perimbangan terus mengalami kenaikan. Berturut-turut dari tahun 2001-2005, penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut: tahun 2001 (Rp 289.894.781.751), tahun 2002 (Rp 294.664.102.543), tahun 2003 (Rp 319.777.338.545), tahun 2004 (Rp 361.122.863.435) dan tahun 2005 (391.134.691.254)

Melihat data-data pemasukan PAD yang selalu melebihi target ini berarti masih tersimpan potensi yang cukup besar untuk dapat mengembangkan dan menggantinya. Paling tidak dari sumber-sumber pemasukan yang telah melampaui target yang dicanangkan, ditahun berikutnya dapat dinaikan target pemasukannya. Kalau pada tahun sebelumnya, target dapat dilewati berarti pada tahun berikutnya, target minimalnya dapat dimulai dari realisasi yang telah kelihatan.

Kendati terdapat perubahan --penerimaan dinaikkan-- pada tahun 2005, ternyata target pemasukan Pendapatan Daerah justru terlampaui. Target Penerimaan Daerah pada tahun 2004 sebesar Rp 425.681.802.448,- ternyata terealisasi sebesar Rp 437.431.563.724.68,-. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran perubahan hanya sebesar Rp 23.598.139.360, tetapi terealisasi menjadi Rp 27.869.312.470,-.

Tingkat inflasi di kabupaten Blitar Atas harga konstan 1993, menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2001 menunjukkan angka inflasi sebesar 7,32, pada tahun berikutnya meningkat menjadi 8,42. Pada

tahun 2003 menurun menjadi sebesar 7,59 dan tahun 2004 semakin menurun menjadi sebesar 7,13. Sedangkan angka inflasi berdasarkan harga konstan tahun 2000, menunjukkan angka yang cenderung menurun. Pada tahun 2002 angka inflasi di kabupaten Blitar sebesar 8,64, sementara tahun 2003 menurun menjadi sebesar 7,3 dan tahun 2004 menurun lagi menjadi sebesar 7,25.

Rata-rata pendapatan daerah dari jasa giro selama lima tahun sebesar Rp. 834.904.155,28. Pertumbuhan pendapatan dari jasa giro rata-rata 987,50% pertahun. Angka pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2003. Pada tahun 2003 angka pertumbuhan jasa giro menunjukkan sebesar minus 94,57%. Sementara itu pada tahun 2005 penerimaan jasa giro meningkat tajam menjadi sebanyak Rp 1.167.440.045,28. Berarti pada tahun 2005 angka pertumbuhan jasa giro meningkat menjadi sebesar 4.031,34%. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 2003 dan tahun 2004.

Sedangkan pertumbuhan investasi di kabupaten Blitar terlihat masih belum berkembang secara meluas. Investasi atau penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten Blitar dalam waktu lima tahun terakhir baru terjadi pada tahun 2003. Pada tahun 2001-2002 belum terlihat adanya penyertaan modal pemerintah kabupaten Blitar.

Pertumbuhan penyertaan modal pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir (2003-2005) rata-rata 2,37% per tahun. Secara riil angka penyertaan modal pemerintah kabupaten Blitar rata-rata sebanyak Rp. 6,989,683,339.63 per-tahun. Pada tahun 2004 investasi meningkat 2,98% dari tahun 2004. Sedangkan tahun 2005 penyertaan modal meningkat 1,75%.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) lembaga, yaitu : PDAM, Bank Jatim, Bank Pasar, PT. BPR Jatim, PD. Savitri Indah dan Lembaga Keuangan Daerah. Penyertaan investasi pada bank Pasar, PT.BPR Jatim dan Lembaga Keuangan Daerah baru dimulai pada tahun 2003. Hingga tahun 2005 investasi Pemerintah Kabupaten Blitar paling banyak terdapat pada institusi PDAM, yaitu sebesar Rp. 4.882.823.544,53. Selama lima

tahun terakhir (2001-2005) jumlah investasi di PDAM tidak mengalami perubahan.

5. Pendidikan

Bagi wilayah yang sedang dalam proses transisi dan berkembang seperti Kabupaten Blitar, keberadaan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat sebetulnya adalah sebuah Investasi atau modal sosial bagi keberlanjutan pembangunan. Tetapi, kondisi sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan termarginalisasi, di sisi lain juga bisa menjadi beban dan bahkan kontra-produktif bagi pembangunan. Sebuah wilayah yang sebagian penduduknya kurang atau tidak berpendidikan dan hidupnya serba kekurangan, niscaya sulit berkembang dengan maksimal karena tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten Blitar dari jenjang TK hingga SLTA secara umum masih memadai. Di jenjang TK terjadi peningkatan jumlah sekolah dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Pada tahun 2000/2001-2002/2003 terdapat sebanyak 642 unit sekolah TK, sementara pada tahun 2004/2005 meningkat menjadi sebanyak 715 unit.

Sedangkan jumlah guru di jenjang TK dalam waktu lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2000/2001 terdapat sebanyak 1.042 orang guru. Berturut-turut pada tahun 2001/2002 terdapat sebanyak 1.062 orang guru, tahun 2003/2004 meningkat menjadi 1.702 orang guru. Sementara pada tahun 2004/2005 meningkat menjadi 2.040 orang. Rasio guru-murid jenjang TK menunjukkan angka 1:19 pada tahun 2004.

Berbeda dengan jenjang TK yang mengalami kenaikan jumlah sekolah, di jenjang SD justru sebaliknya. Dari tahun 2000 hingga tahun 2004 menunjukkan semakin menurun jumlah sekolah. Pada tahun 2000 terdapat sebanyak 763 unit baik negeri maupun swasta. Sedangkan pada tahun 2004 menurun menjadi

sebanyak 743 unit. Jumlah guru di jenjang SD selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Berturut-turut dari tahun 2000 di kabupaten Blitar terdapat sebanyak 6.703 orang guru jenjang SD baik swasta maupun negeri. Pada tahun 2001 jumlah guru SD menurun menjadi 6.600 orang, tahun berikutnya (2002) menurun menjadi 6.566 orang. Pada tahun 2003 berjumlah 6.468 orang dan tahun 2004 semakin menurun menjadi sebanyak 6.225 orang.

Jenjang SLTP menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dengan jenjang SD, yaitu mengalami penurunan jumlah sekolah. Pada tahun 2000 terdapat sebanyak 86 unit sekolah yang terdiri dari 45 unit SLTP swasta dan 41 unit SLTP Negeri. Sementara jumlah guru justru pada tahun 2004 semakin meningkat dibanding tahun 2000. Pada tahun 2000 jumlah guru di jenjang SLTP sebanyak 2.118 orang, tetapi pada tahun 2004 meningkat menjadi 2.293 orang.

Kondisi berbalik dengan pendidikan jenjang SLTA. Jumlah sekolah SLTA misalnya pada tahun 2004 justru meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2000. Pada tahun 2000 di kabupaten Blitar terdapat sebanyak 15 unit yang terdiri dari 8 unit SLTA swasta dan 7 unit SLTA negeri. Sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi 33 unit SLTA, yang terdiri dari 24 unit SLTA swasta dan 9 unit SLTA negeri.

Di bidang pendidikan tampaknya kabupaten Blitar harus lebih giat untuk menurunkan angka buta huruf yang masih tersisa. Berbagai terobosan di bidang pendidikan belum mampu secara tuntas menghilangkan penduduk yang masih buta huruf. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2006 menunjukkan angka penduduk yang masih buta terlihat semakin menurun. Pada tahun 2005 masih terdapat sebanyak 16.114 orang. Pada tahun 2004 masih terdapat penduduk buta huruf sebanyak 16.951 orang, tahun 2003, sebanyak 17.638 orang, tahun 2002 sebanyak 18.378 orang dan tahun 2001 masih terdapat sebanyak 19.088 orang.

Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di masa-masa mendatang masih memerlukan kerja keras untuk meningkatkan angkanya. Tetapi pada tahun 2005 angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun lebih tinggi dibanding dengan angka partisipasi usia yang sama dengan Jawa Timur. Pada tahun yang sama angka partisipasi usia 7-12 tahun sebanyak 3.764.814 orang atau sebesar 97,51%. Sementara angka partisipasi di kabupaten Blitar sebanyak 108.265 atau sebesar 98,92%.

Pada tahun 2005, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun di kabupaten Blitar menunjukkan lebih baik dibanding dengan angka di Jawa Timur. Di kabupaten Blitar angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun sebesar 95,08% (53.238 jiwa), sementara di Jawa Timur sebesar 88,16% (1.641.361 jiwa). Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun di kabupaten Blitar tahun 2001 sebesar 86,46%, tahun 2002 meningkat sebesar 87,66%. Tetapi tahun 2003 angka partisipasi usia yang sama turun menjadi sebesar 87,10%. Pada tahun berikutnya semakin menurun menjadi sebesar 84,11%.

Sementara untuk angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, kabupaten Blitar tampaknya harus lebih giat lagi untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Kalau dibanding dengan angka partisipasi di tingkat Jawa Timur pada usia yang sama masih lebih rendah. Pada tahun 2005 angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun sebesar 52,03%, sementara di Jawa Timur sebesar 54,64%. Berturut-turut pada tahun 2001 angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun sebesar 52,22%, tahun 2002 sebesar 52,20%, tahun 2003 sebesar 52,26% dan tahun 2004 menurun menjadi sebesar 43,55%.

Sementara itu, menurut data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur tahun 2005 menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir (2002-2005) cenderung semakin bertambah membaik. Pada tahun 2002 angka IPM menunjukkan sebesar 66,48. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas manusia. Hasilnya pada tahun 2003, angka IPM semakin membaik menjadi sebesar 67,67. Tetapi pada tahun 2004 angka IPM sempat menurun menjadi 67,19. Turunnya angka IPM ini rupanya membuat pemerintah kabupaten Blitar berupaya keras memperbaiki

kualitas manusia di wilayahnya. Berbagai upaya yang dilakukan ternyata membuahkan hasil dengan meningkatnya angka IPM. Bahkan selama empat tahun terakhir (2002-2005) angka IPM tahun 2005 paling tinggi, yaitu sebesar 68,50.

Jumlah sekolah berbasis agama (Islam) di kabupaten Blitar dalam jangka waktu dua tahun terakhir tidak banyak mengalami peningkatan yang berarti. Jumlahnya tampak statis di berbagai jenjang, kecuali RA dan MA. Per jenjang jumlah sekolah paling banyak adalah MI, hingga tahun 2006 sebanyak 192 unit.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di jenjang sekolah (SD,SLTP dan SLTA) menunjukkan kecenderungan perubahan yang berbeda-beda. Selama tiga tahun terakhir (2003/2004-2005/2006), di jenjang SD dan SLTA, APK menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Tahun ajaran 2003/2004 APK jenjang SD sebesar 100,28, sementara tahun ajaran 2005/2006 menurun menjadi sebesar 97,21. Sementara itu jenjang SLTA APK turun dari APK sebesar 26,54 menjadi 24,32. Sebaliknya APK di jenjang SLTP semakin meningkat dari 69,76 menjadi sebesar 72,14.

Sementara itu rasio siswa-guru di jenjang SD, SLTP dan SLTA di kabupaten Blitar masih terlihat cukup ideal. Misalnya di jenjang SD pada tahun 2003/2004 angka rasio siswa-guru sebesar 14:1, sementara di jenjang SLTA menunjukkan gambaran yang sama. Rasio siswa-guru di jenjang SLTA sebesar 12:1. Kendati rasio siswa-guru tergolong ideal, tetapi dalam tiga tahun terakhir tingkat kelulusan di jenjang SD, SLTP dan SLTA justru semakin menurun. Di jenjang SD tahun ajaran 2003/2004 mencapai sebesar 100%, sementara pada tahun 2005/2006 menurun menjadi 98%. Demikian juga jenjang SLTP, dari 100% menjadi sebesar 96% pada tahun 2005/2006. Di jenjang SLTA justru angka penurunan kelulusan semakin besar, dari sebesar 100% pada tahun 2002/2003 menjadi 93% pada tahun 2005/2006.

6. Agama

Di bidang keagamaan terlihat kelima agama seperti Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha dapat hidup berdampingan di wilayah kabupaten Blitar. Pada tahun 2004 jumlah pemeluk agama Islam paling banyak diantara pemeluk agama lain, yaitu sebanyak 1.054.906 orang. Pemeluk terbanyak kedua adalah agama Protestan, yaitu sebanyak 24.222 orang. Pemeluk terbanyak ketiga adalah agama Hindu, yaitu sebanyak 23.860 orang.

Beragamnya pemeluk agama di kabupaten Blitar tidak terlepas dari sejarah di masa silam. Sisa-sisa sejarah masa lalu yang menggambarkan beragamnya agama dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan beberapa situs seperti candi atau pura. Selain itu beragamnya tempat-tempat ibadah yang ada menunjukkan hubungan antara agama satu dengan agama lainnya cukup terbina baik. Beragamnya agama yang ada menjadi kekayaan budaya tersendiri.

Tempat beribadah dari kelima agama tersedia di kabupaten Blitar. Bagi agama Islam terdapat sebanyak 911 unit masjid dan 3.611 musholla/langgar. Jumlah gereja bagi umat Protestan sebanyak 64 unit, sedangkan bagi umat Katholik sebanyak 41 unit. Di kabupaten Blitar masih terdapat sebanyak 85 unit pura dan sebanyak 23 unit Vihara. Banyak tempat-tempat ibadah dari berbagai agama menunjukan kehidupan agama telah lama berkembang di masa-masa sebelumnya.

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat tampak beragam. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat itu masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama.

Namun begitu seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi akhir-akhir ini disadari atau tidak memberikan dampak yang sangat serius terhadap perkembangan moralitas generasi muda. Merebaknya minuman

keras, narkoba dan seks bebas dikalangan generasi muda sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi yang tidak diikuti oleh penanaman nilai-nilai moralitas yang kuat dan kokoh pada generasi muda. Hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga memerlukan upaya-upaya yang sinergis dan terpadu dari pemerintah, orangtua (keluarga) dan masyarakat.

Akan tetapi, ada pula sebagian masyarakat yang kehidupannya sudah mendekati, bahkan sesuai dengan ajaran agama.

Dengan demikian, telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan internal dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Namun, upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama belum juga berhasil dengan baik, terutama di tingkat masyarakat. Indikasinya adalah masih terjadinya disharmoni antar umat beragama terutama yang ditimbulkan oleh penyebaran agama terhadap penganut agama lain dan pendirian tempat ibadah ditengah-tengah mayoritas penganut agama lain.

Ajaran agama mengenai kejujuran, etos kerja, penghargaan pada prestasi, dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Selain itu, pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari juga diperlukan penanaman nilai-nilai agama sejak dini yaitu mulai pra sekolah hingga sekolah lanjutan harus terencana dengan baik serta menumbuhkembangkan pendidikan agama secara informal ditengah-tengah masyarakat.

7. Politik

Selain kondisi sosial budaya masyarakat, perlu juga kiranya disinggung soal politik di kabupaten Blitar. Dalam membangun kehidupan berdemokrasi di Kabupaten Blitar, salah satu pilar dan prasyarat yang dibutuhkan tak pelak adalah kedewasaan sikap berpolitik dan keberdayaan masyarakat sipil (*civil*

society). Keberadaan dan keberdayaan masyarakat sipil ini dibutuhkan, bukan sekadar untuk memobilisasi dan menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian-bagiannya, dan untuk menyampaikannya kepada para pemegang kekuasaan dan wakil rakyat. Tetapi, yang tak kalah penting peran masyarakat sipil ini adalah untuk membantu memantau dan menjamin agar lembaga-lembaga layanan publik serta pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan benar-benar dilaksanakan secara konsisten, adil dan non-diskriminatif, serta bagaimana mereka ikut membangun mekanisme kontrol dan memberikan masukan yang konstruktif melalui mekanisme *check and balance*.

Di Kabupaten Blitar sendiri, sejak reformasi bergulir, di kalangan masyarakat bukan saja muncul keterbukaan dan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber. Tetapi, warga masyarakat juga berkesempatan untuk mengorganisasi diri ke dalam berbagai wadah, asosiasi, lembaga, dan juga partai politik tanpa rasa was-was atau dibayang-bayangi dengan berbagai regulasi yang membatasi hak-hak warga untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta menyampaikan aspirasinya.

Berbeda dengan situasi satu dekade silam, di mana kebebasan dan kemerdekaan warga masyarakat untuk berpolitik acapkali masih dikendalikan secara sentralistik oleh kekuatan pusat, di era otonomi seperti sekarang ini kehidupan berdemokrasi pelan-pelan mulai berkembang, dan bahkan terus dikembangkan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif kini benar-benar merupakan mitra sejajar yang tidak lagi ada pihak yang ter subordinasi satu dengan yang lain. Demikian pula peran berbagai LSM, CBO (*Community Based Organization*), tokoh masyarakat, ulama, dan berbagai institusi lokal yang memiliki akar kuat di masyarakat seperti Pondok Pesantren tidak hanya menjadi obyek, tetapi mereka merupakan subyek pembangunan dan kekuatan yang diperhitungkan dalam kehidupan politik.

Di Kabupaten Blitar, salah satu tolok ukur yang memperlihatkan peran penting masyarakat sipil dan sekaligus mencerminkan kedewasaan sikap politik masyarakat adalah keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung yang baru pertama kali dilakukan pasca reformasi. Yang dimaksud Pilkada di sini sesungguhnya bukan sekadar bagian dari proses sirkulasi elit politik atau persaingan partai politik menempatkan figur andalannya untuk menduduki jabatan politik di tingkat daerah. Tetapi, secara ideal makna Pilkada dalam konteks kehidupan berdemokrasi adalah sebuah prasyarat sekaligus instrumen yang dibutuhkan untuk memenuhi hakekat dan tujuan otonomi daerah.

Untuk tahun-tahun mendatang, ketika kedewasaan sikap berpolitik masyarakat Kabupaten Blitar sudah makin dewasa, dan kekuatan masyarakat sipil juga sudah makin berdaya, maka bisa diprediksi bahwa lima, sepuluh atau duapuluh tahun lagi kehidupan berpolitik warga Kabupaten Blitar benar-benar akan makin demokratis dan transparan, sehingga yang namanya *Good Governance* niscaya bukan hanya merupakan cita-cita alias benar-benar akan terwujud.

Sebagai wujud dan implementasi demokrasi di Indonesia dan di Kabupaten Blitar khususnya, pada tahun 2004 menghasilkan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Blitar dengan komposisi : PDI Perjuangan = 16, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 12, Partai Golkar = 8, Partai Demokrat = 5, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) = 1, Partai Amanah Nasional (PAN) = 2, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) = 1 sehingga total jumlah kursi sebanyak 45.

8. Pemerintahan dan Kinerja Birokrasi

Sejak kebijakan otonomi daerah dicanangkan, sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun *good governance*. Kehadiran UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25

Tahun 1999 —yang merupakan tonggak awal (*bench mark*) pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi— bukan saja mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencoba lebih peka pada kebutuhan lokal, tetapi juga dapat bekerja lebih efisien dan efektif, khususnya dalam upaya memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada warga masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Disadari bahwa hakekat otonomi, pada dasarnya bukan sekadar pengalihan otoritas dari pusat ke daerah, tetapi yang terpenting adalah: apa implikasi dari pengalihan otoritas itu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Banyak pihak mengatakan reformasi birokrasi publik di Indonesia menemukan bahwa reformasi politik yang tidak diikuti dengan reformasi sistem kelembagaan atau reformasi birokrasi ternyata tidak banyak menghasilkan perbaikan kualitas pelayanan publik, bahkan sebagian justru terasa makin menurun. Kendati sejak reformasi kadar keberdayaan masyarakat telah makin meningkat, hubungan eksekutif-legislatif juga makin berimbang dan demokrasi pada batas-batas tertentu juga telah mulai menemukan bentuknya. Tetapi, tanpa dibarengi dengan perbaikan kinerja birokrasi, maka dampak yang bisa langsung dirasakan masyarakat sesungguhnya masih menjadi tanda tanya.

Di Kabupaten Blitar sendiri, meski telah dilakukan langkah-langkah perbaikan, tetapi diakui atau tidak hingga saat ini masih cukup warga masyarakat yang belum memperoleh pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan berbagai bentuk pelayanan publik lain secara maksimal. Situasi krisis yang tak kunjung usai dan masa transisi pasca reformasi bagaimana pun tidak serta merta melahirkan perubahan seperti yang diharapkan. Di tengah keterbatasan dana pembangunan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran birokrasi yang masih belum merata —bahkan sebagian masih belum lepas sama sekali dari pola yang lama di masa Orde Baru—, maka upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan membangun *good governance* seringkali masih tersendat-sendat. Belum

dimilikinya standar pelayanan minimal yang bisa dijadikan acuan yang pasti, dan juga karena belum didukung oleh penataan aparat birokrasi yang efisien dan efektif, adalah beberapa faktor yang ditengarai mempengaruhi kualitas pelayanan publik sebagaimana diharapkan.

Di Kabupaten Blitar, menurut data dari Blitar Dalam Angka tahun 2004 diketahui Jumlah PNS pada tahun 2004 adalah 12.730 orang. Apakah jumlah aparatur pemerintahan sebanyak ini termasuk efisien atau tidak barangkali masih bisa diperdebatkan. Satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan, prasyarat utama yang dibutuhkan, tak pelak adalah kualitas pendidikan aparatur yang memadai, komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, penataan kepegawaian yang transparan dan profesional, serta dukungan sistem jaringan kerjasama antar lembaga yang solid. Sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), niscaya tidak akan dapat tercipta jika tidak didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni dan tatanan birokrasi yang profesional dan peka pada lingkungan di sekitarnya.

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam penataan birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik di jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu: penemuan kembali jati diri (*reorientasi*), penyusunan kembali struktur (*restrukturisasi*) dan upaya penyatuan sistem kerja yang menghasilkan sinergi kinerja (*aliansi*). Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun *good governance*, niscaya akan banyak bertali-temali dengan faktor-faktor lain, sehingga penanganan yang dilakukan tentu tidak akan bisa secara parsial, tetapi harus benar-benar komprehensif. Secara garis besar, beberapa kendala yang menghambat upaya membangun *good governance* di Kabupaten Blitar adalah:

1. Belum berkembangnya *code of conduct* yang benar-benar kuat —yang menjadi spirit atau roh bagi seluruh aparat birokrasi dalam menjalankan

tugas-tugas mereka melayani masyarakat. Di masa pemerintahan yang termasuk masih transisional —yakni dari model awal yang semula serba sentralistik dan *top-down*, kemudian diharuskan berubah ke pola baru yang lebih terdesentralistik dan *bottom-up*—, harus diakui terkadang masih timbul kegamangan, sehingga respon birokrasi terhadap tuntutan perkembangan masyarakat terkadang agak lamban.

2. Tugas utama birokrasi adalah melayani kepentingan publik, tetapi harus diakui masih sering terjadi akuntabilitas birokrasi kepada publik belum berkembang maksimal.
3. Masih belum optimalnya koordinasi. Meskipun sudah dirinci tugas dan kewenangan masing-masing dinas, badan atau lembaga sesuai TUPOKSI-nya, tetapi koordinasi dan jaringan kerjasama antar lembaga yang ada umumnya masih belum berkembang secara maksimal. Bahkan, tidak jarang masih berkembang ego sektoral yang kuat, sehingga kinerja birokrasi secara keseluruhan menjadi kurang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Fokus dan prioritas jenis pelayanan publik yang dikembangkan jajaran birokrasi di Kabupaten Blitar harus diakui masih belum tertata dengan baik, sehingga masing-masing dinas atau lembaga yang ada seolah-olah belum memiliki acuan yang sama tentang arah yang hendak dituju. Orientasi dinas atau lembaga, dalam banyak hal lebih melayani kepentingan birokrasi itu sendiri, dan bahkan dalam beberapa kasus justru mengembangkan sikap yang meminta dilayani dengan berbagai fasilitas atau keistimewaan daripada melayani masyarakat.

Ke depan, untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan membangun tata pemerintahan yang lebih baik, perlu disadari bersama bahwa birokrasi sesungguhnya bukan hanya sebuah lembaga pemerintah yang berfungsi melayani kebutuhan masyarakat atau sekadar perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan program-program pembangunan. Lebih dari itu, birokrasi adalah sebuah komunitas, kumpulan orang-orang yang memiliki tugas dan peran

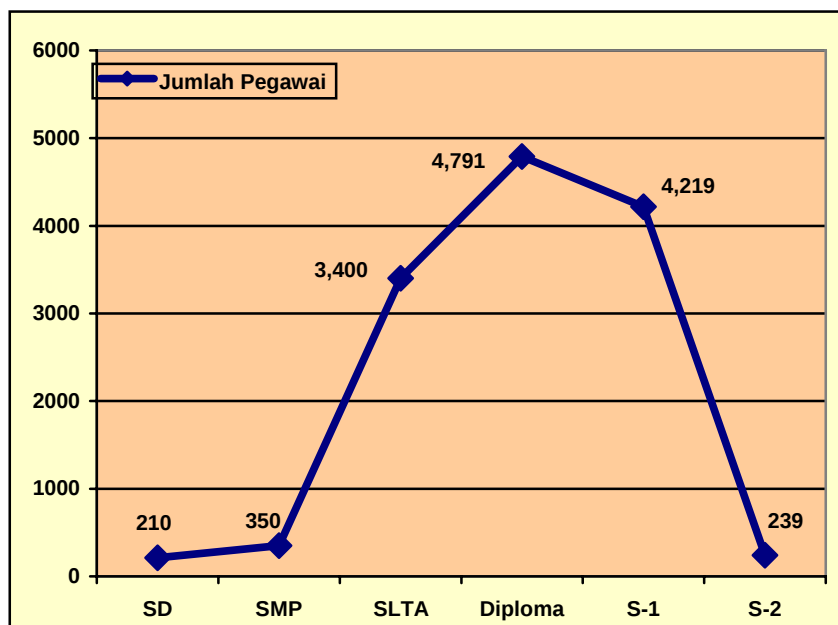
untuk merencanakan program pembangunan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sekaligus memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat merespon program-program pembangunan dengan memadai.

Birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok: Pertama, memberikan pelayanan umum (*service*) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan menyediakan jaminan keamanan bagi penduduk. Kedua, melakukan pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas usaha, serta melaksanakan pendidikan. Ketiga, menyelenggarakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, perdagangan dan sebagainya.

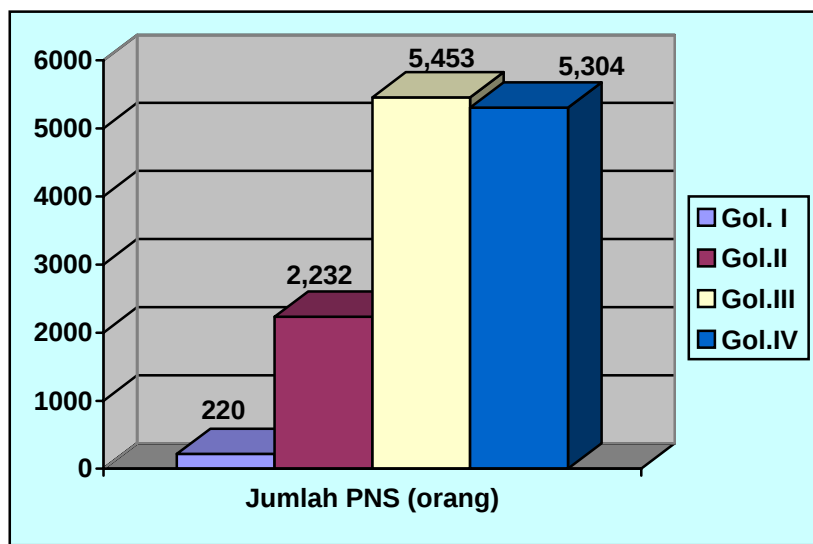
Agar aparatur birokrasi di Kabupaten Blitar dapat menjalankan tugas dengan baik, selain tetap menjaga akuntabilitasnya kepada publik, yang tak kalah penting adalah bagaimana birokrasi tidak hanya bekerja di bawah garis komando atau instruksi-instruksi yang sifatnya *top-down*. Kreativitas, sikap inovatif dan kepekaan pada persoalan di tingkat lokal adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang bekerja hanya atas dasar proyek dan kepentingan pribadi, niscaya akan selalu lambat merespon situasi terbaru, dan ujung-ujungnya jangan heran jika mereka pelan-pelan menjadi usang, bahkan mengalami krisis dalam dirinya sendiri. Birokrasi yang usang, mereka bukan saja akan menghambat pembangunan, tetapi mereka juga akan menjadi sumber kegagalan pembangunan itu sendiri.

Sebagai salah satu variabel penentu kualitas kinerja birokrasi di Pemerintah Kabupaten Blitar, tingkat pendidikan dan komposisi pegawai negeri sipil di Kabupaten Blitar dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

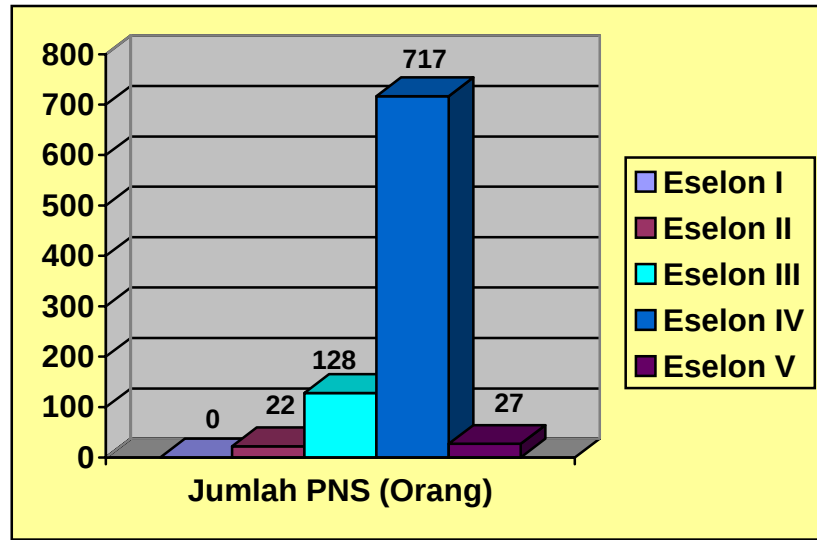
Grafik. 1
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Blitar



Grafik. 2
Komposisi PNS Kabupaten Blitar berdasar Golongan/ Kepangkatan



Grafik. 3
Komposisi PNS Kabupaten Blitar Berdasar Eseloning



Dari komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar, hal yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah tentang perlunya kebijakan tentang pengadaan tenaga teknis dan fungsional untuk mengoptimalkan kinerja SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi teknis.

9. Sarana dan Prasarana

Gerak pembangunan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Blitar tidak dapat terlepas dari pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai aktivitas dan kepentingan masyarakatnya. Jalan adalah salah satu bentuk prasarana yang dibutuhkan penduduk untuk melakukan mobilitas. Apabila suatu lokasi atau daerah tanpa prasarana jalan maka kemungkinan besar menjadi daerah terisolasi atau terpencil. Panjang jalan propinsi di kabupaten Blitar dari tahun 2002-2004 tidak mengalami penambahan. Selama tiga tahun panjang jalan propinsi tetap sepanjang 62,45 Km dalam kategori kelas jalan termasuk kelas II dalam keadaan baik.

Panjang jalan kabupaten dengan jenis permukaan aspal dalam jangka waktu lima tahun mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 2000 di kabupaten Blitar terdapat sepanjang 846,19 km merupakan jalan kabupaten. Sementara pada tahun 2004 telah meningkat menjadi 1.015,94 km. Sebaliknya jenis permukaan jalan makadam semakin pendek. Misalnya pada tahun 2002 masih sepanjang 140,31 km, tetapi pada tahun 2004 menjadi 128,31 km.

Dilihat dari kondisi jalannya, maka terlihat selama lima tahun terakhir perbaikan terus dilakukan. Terlihat dari tahun 2000 kondisi jalan yang masuk kategori “baik” semakin panjang. Pada tahun 2000 kondisi jalan terkategori baik sepanjang 596,70 km, sementara pada tahun 2004 meningkat menjadi sepanjang 755,56 km. Pada tahun 2000 jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 207,18 km, sedangkan pada tahun 2004 menjadi sepanjang 177,54 km.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sampai dengan saat ini adalah masih terkendala keterbatasan anggaran mengingat ruang lingkup dan jangkauan sarana prasarana yang ditangani sangat luas dan panjang. Sementara anggaran pembiayaan masih harus berbagai dengan sektor dan bidang lain yang juga tidak kalah pentingnya, misalnya bidang pendidikan dan kesehatan yang pada kenyataannya juga membutuhkan dana yang sangat besar.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar selain menyusun skala prioritas program dan kegiatan juga berupaya mencari terobosan pembiayaan melalui alokasi dana APBN dalam hal ini kementerian/lembaga Non Departemen serta Pihak Ketiga melalui investasi.

10. Kesehatan

Di bidang kesehatan hingga tahun 2004 di kabupaten Blitar terdapat 1 Rumah Sakit Umum yang terdapat di kecamatan Wlingi. Sementara itu masih terdapat sebanyak 24 Puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan. Bahkan di kecamatan Ponggok dan Gandusari masing-masing terdapat sebanyak 2 unit

Puskesmas. Selain itu masih terdapat sebanyak 68 unit Puskesmas Pembantu. Prasarana kesehatan lain berupa Klinik KB/KIA/Polindes hingga tahun 2004 berjumlah sebanyak 184 unit.

Hingga tahun 2004, pertolongan persalinan yang dilakukan oleh penduduk kabupaten Blitar tidak sedikit yang masih menggunakan jasa dukun. Namun demikian dari segi kuantitas penduduk yang melahirkan meminta pertolongan (ditolong) oleh dukun semakin menurun. Berturut-turut dari tahun 2000-2004 persentase kelahiran yang ditolong oleh dukun adalah 2,97% (2000), 2,46% (2001), 2,28% (2002), 2,25% (2003) dan 1,80% (2004).

Kendati sebagian masyarakat masih ada yang meminta pertolongan pada jasa dukun dalam proses kelahiran, tetapi jumlahnya masih kalah jauh dibanding dengan penduduk yang menggunakan jasa bidan. Sementara penduduk yang menggunakan jasa bidan dalam proses persalinan mencapai sebesar 92,58%. Sedangkan yang menggunakan jasa dokter dalam proses persalinan pada tahun 2004 hanya sebesar 5,62%.

Sementara itu dari segi kuantitas jumlah bidan lebih banyak dibanding dukun apalagi dokter. Pada tahun 2004 di kabupaten Blitar tercatat sebanyak 289 bidan yang tersebar di berbagai desa.

Tenaga kesehatan yang ada di kabupaten Blitar terdiri dari dokter umum yang berjumlah 38 orang pada tahun 2000 meningkat menjadi sebanyak 40 orang pada tahun 2004. Sebaliknya jumlah dokter gigi justru mengalami penurunan dari tahun 2000 berjumlah 22 orang menjadi 13 orang pada tahun 2004. Demikian juga dokter spesialis, dari 12 orang pada tahun 2000, menjadi tidak ada sama sekali pada tahun 2004. Tetapi jumlah bidan semakin mengalami kenaikan dari tahun 2000 sebanyak 269 orang menjadi 289 orang pada tahun 2004.

Oleh sebab itu, kedepan perlu direncanakan dan diprioritaskan kegiatan berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran pembiayaan, diantaranya adalah :

- Peningkatan sarana prasarana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
- Revitalisasi Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat
- Penyediaan dokter spesialis untuk mendukung kinerja pelayanan dibidang kesehatan
- Penyediaan tenaga paramedis dan non para medis untuk mendukung kinerja pelayanan kesehatan
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Program JAMKESMAS

11. UMKM

Di sektor industri, salah satu roda penggerak ekonomi adalah adanya industri. Berdasarkan data kabupaten Blitar dalam angka 2000, profil industri kecil adalah paling dominan dibanding lainnya. Jumlah industri kecil di kabupaten Blitar mencapai sebesar 99,64%, sementara sisanya adalah industri sedang dan besar. Secara statistik pada tahun 2000 jumlah industri kecil mengalami peningkatan dibanding tahun 1999. Pada tahun 1999 jumlah industri kecil mencapai sebanyak 25.197 unit usaha, sementara pada tahun 2000 meningkat menjadi sebanyak 25.336 unit usaha. Berarti jumlah industri kecil dari tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami peningkatan sebesar 0,55%. Pada tahun 2004 industri kecil berjumlah sebanyak 11.114 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 31.304 orang. Dilihat dari karakteristiknya, industri kecil di kabupaten Blitar terbagi menjadi dua, yaitu industri kecil formal dan non formal. Dari kedua karakteristik ini, jumlah industri kecil non formal jumlahnya jauh lebih besar daripada industri kecil formal. Tahun 2000 jumlah industri kecil formal berjumlah 338 unit, sementara jumlah industri kecil non formal pada tahun yang sama berjumlah sebanyak 25.028 unit. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah industri kecil formal mengalami peningkatan sebesar 22 unit. Tahun 1999 jumlah industri kecil formal mencapai sebesar 316 unit. Dari

tahun ke tahun, sejak tahun 1996 jumlah industri kecil formal menunjukkan angka kenaikan. Secara berturut-turut jumlah industri kecil formal tahun 1996 sebanyak 279 unit, tahun 1997 sebanyak 294 unit dan tahun 1998 sebanyak 303 unit.

Sementara itu pada tahun 2004 jumlah industri kecil formal meningkat menjadi sebanyak 466 unit, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.048 orang. Nilai investasi industri kecil formal pada tahun 2004 mencapai sebesar Rp 6.825.435.000. Sedangkan industri kecil non formal pada tahun 2004 berjumlah sebanyak 10.648 unit usaha, sementara jumlah tenaga kerja sebanyak 26.256 orang. Nilai investasi industri kecil non formal sebanyak Rp 168.300.000.000,-.

Sedangkan jumlah industri kecil non formal dari tahun 1999 ke tahun 2000 menunjukkan gejala yang sama dengan industri kecil formal, yaitu mengalami peningkatan. Pada tahun 1999 jumlah industri kecil non formal sebanyak 24.870 unit. Berarti pada tahun 2000 terjadi kenaikan sebesar 158 unit dibanding tahun sebelumnya.

Dilihat dari jenis usahanya secara garis besar industri kecil terbagi menjadi tiga macam yaitu industri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka dan industri logam, mesin dan kimia. Baik industri formal maupun non formal, jenis industri hasil pertanian menunjukkan angka yang paling besar dibanding jenis lainnya. Pada industri kecil formal, jumlah industri hasil pertanian dan kehutanan berjumlah sebanyak 250 unit, sementara pada industri kecil non formal berjumlah sebanyak 18.090 unit. Sedangkan industri kecil Aneka berjumlah sebanyak 1.798 unit yang terdiri dari 1.788 unit industri kecil non formal yang termasuk industri Aneka dan sisanya sebanyak 10 unit industri kecil non formal yang terkategori industri Aneka. Industri kecil logam, mesin dan kimia pada tahun 2000 mencapai sebanyak 5.228 unit yang terdiri 78 unit termasuk industri kecil formal dan 5.150 unit termasuk industri kecil non formal.

Pada tahun 2004 industri kecil formal menurut kelompok industri kecil pertanian dan kehutanan berjumlah sebanyak 344 unit dengan jumlah tenaga sebanyak 3.562 orang. Sementara nilai investasi mencapai sebesar Rp 10.233.000.000,-. Sedangkan nilai produksi mencapai sebesar Rp 60.553.000.000,-. Industri kecil formal menurut kelompok industri aneka berjumlah 41 unit, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 558 orang. Sedangkan nilai investasi sebesar Rp 6.345.000.000,-.

Peningkatan secara kuantitas industri kecil berdampak juga pada peningkatan tenaga kerja. Pada tahun 1999 tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mencapai sebesar 46.639 orang, sementara pada tahun berikutnya meningkat menjadi 48.076 orang. Seperti telah disinggung, jumlah industri kecil non formal jauh lebih besar dibanding industri kecil formal, karenanya tenaga kerja yang diserapnya juga lebih besar. Tenaga kerja yang terserap di industri kecil formal hanya sebesar 3.357 orang, sementara di industri kecil non formal mencapai sebesar 44.719 orang, yang berarti mencapai lebih dari 10 kali lipat. Dilihat dari kelompok industri, tenaga kerja yang terserap di industri kecil baik formal maupun non formal sebagian besar berada pada industri hasil pertanian dan kehutanan.

Di kelompok industri kecil formal misalnya dari 3.357 orang, sebanyak 2.381 orang atau 70% berada pada industri hasil pertanian dan kehutanan. Demikian juga pada industri kecil non formal menunjukkan kecenderungan yang sama. Dari 44.719 orang tenaga kerja, sebesar 73,99% terserap pada industri kecil hasil pertanian dan kehutanan, sementara sisanya 21,31% pada industri kecil logam, mesin dan kimia.

Dilihat dari jenis produk yang dihasilkan, industri kecil di kabupaten Blitar paling banyak adalah gula kelapa. Di kabupaten ini industri gula kelapa pada tahun 2000 mencapai sebanyak 8.818 unit. Dari data statistik terlihat bahwa jumlah industri gula kepala pada tahun 2000 mengalami penurunan dibanding tahun 1999. Pada tahun 1999 jumlah industri gula kelapa di

kabupaten Blitar mencapai sebanyak 9.304 unit. Daerah kecamatan yang memiliki jumlah industri gula kelapa paling banyak adalah Nglegok, yaitu mencapai 2.338 unit. Sedangkan kecamatan yang sama sekali tidak ada usaha industri kecil gula kelapa ada tiga kecamatan yaitu Bakung, Wonotirto dan Binangun.

Industri kecil gula kelapa tampaknya perlu mendapat perhatian serius, karena selama lima tahun terakhir secara kuantitas baik di sentra maupun non sentra mengalami penurunan. Pada tahun 2000 misalnya, berjumlah 8.818 unit usaha di sentra, sementara pada tahun 2004 menurun menjadi sebanyak 5.070 unit. Sedangkan industri kecil di non sentra pada tahun 2000 berjumlah sebanyak 324 unit, sementara pada tahun 2004 menurun menjadi 296 unit.

Selain industri gula kelapa, yang dihasilkan dari industri kecil di kabupaten Blitar adalah emping mlinjo. Jumlah industri kecil emping mlinjo tahun 2004 mencapai sebanyak 91 unit. Dari jumlah ini paling banyak terdapat di kecamatan Wates, yaitu mencapai sebanyak 40 unit

Industri anyam-anyaman di kabupaten ini juga termasuk relatif banyak yang menekuninya. Menurut data tahun 2000 jumlah industri kecil anyam-anyaman mencapai sebanyak 1.360 unit. Sementara Pada tahun 2004 menurun menjadi 880 unit usaha. Industri kecil anyam-anyaman di kabupaten Blitar dapat ditemui di beberapa kecamatan kendati dengan jumlah yang sangat bervariasi. Di kecamatan Udanawu juga ditemui penduduk yang menekuni anyam-anyaman kendati hanya sebanyak 212) unit. Per kecamatan terlihat bahwa pusat industri anyam-anyaman ada di kecamatan ada di Udanawu.

Di luar industri kecil tersebut masih banyak lagi jenisnya yang ada di kabupaten Blitar. Pada tahun 2004 industri genteng mencapai sebanyak 549 unit, yang tersebar di beberapa kecamatan. Industri genteng ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2000. Pada tahun 2000 industri genteng berjumlah 630 unit. Jumlah industri genteng paling banyak terdapat di kecamatan Talun, yaitu 161 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 274

orang. Industri kecil tempe di kabupaten Blitar sebanyak 717 unit pada tahun 2000 yang tersebar di seluruh kecamatan. Industri kecil tempe inipun mengalami penurunan pada tahun 2004. Pada tahun 2004 jumlah industri tempe tinggal sebanyak 477 unit. Sebagai pusatnya terdapat di kecamatan Talun, yaitu sebanyak 54 unit.

Namun begitu upaya untuk mendukung berkembangnya industri kecil di Kabupaten Blitar masih kurang optimal yang antara lain disebabkan oleh masih rendahnya penetrasi investasi khususnya investor dari luar daerah serta keterbatasan daya dukung pendanaan oleh APBD Kabupaten Blitar.

B. TANTANGAN

Ke arah mana dan seperti apakah kondisi, serta bagaimanakah perkembangan Kabupaten Blitar 20 tahun mendatang? Untuk menjawab hal ini harus diakui bukan hal yang mudah. Dalam periode dua dekade, sudah barang tentu tidak sedikit perubahan yang bakal terjadi. Namun demikian, dapat diprediksi bahwa Kabupaten Blitar dalam 20 tahun ke depan niscaya akan berkembang makin baik, makin sejahtera dan tidak akan ketinggalan bila dibandingkan dengan perkembangan kabupaten/kota lain di Pulau Jawa.

1. Kemiskinan

Untuk saat ini, jujur harus diakui bahwa Kabupaten Blitar masih mengidap berbagai masalah sosial, seperti kualitas sumber daya manusia yang sebagian besar kurang berpendidikan dan tekanan kemiskinan yang berat. Berdasarkan *Updating Rumah Tangga Miskin Tahun 2006* oleh PAM DKB Jawa Timur di kabupaten Blitar masih terdapat sebanyak 78.246 keluarga yang masih terkategori miskin. Sedangkan data Analisis Indikator Makro Propinsi Jawa Timur tahun 2005, di kabupaten Blitar masih terdapat sebanyak 166.354 penduduk terkategori miskin. Dibandingkan tahun 2004, jumlah penduduk

miskin di Kabupaten Blitar cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin tercatat hanya 195.366 jiwa. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin sempat turun hingga tinggal 192.317 jiwa. Tetapi, ketika perkembangan sektor riil yang tak kunjung membaik, dan masyarakat masih harus berhadapan dengan imbas situasi krisis yang belum sepenuhnya pulih, maka pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin kembali meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Menghilangkan penduduk miskin sama sekali dari kabupaten Blitar memang terasa mustahil. Tetapi menurunkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun mendatang bukanlah yang mustahil. Melihat tekad pemerintah kabupaten Blitar yang berusaha sekuat tenaga dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. Tentu dengan catatan kondisi-kondisi penyebab kemiskinan itu sendiri di masa mendatang tidak justru semakin banyak dan beragam muncul di permukaan. Dalam kondisi normal (penyebab kemiskinan bermunculan) tekad pemerintah kabupaten Blitar menurunkan angka penduduk miskin secara maksimal akan mudah tercapai.

2. Pendidikan

Bidang pendidikan dalam 20 tahun mendatang masih membutuhkan kerja keras yang cukup tinggi karena hingga tahun 2005 kabupaten Blitar belum benar-benar terbebas dari buta huruf. Kendati pada tahun 2005 angka penduduk yang masih buta huruf paling rendah di banding tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 97.379 orang (10,26%). Pada tahun 2004 masih terdapat penduduk buta huruf sebanyak 119.876 orang (12,89%), tahun 2003, sebanyak 100.200 orang (10,75%), tahun 2002 sebanyak 121.744 orang (13,59%) dan tahun 2001 masih terdapat sebanyak 112.893 orang (12,79%).

Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, sebenarnya pemerintah kabupaten Blitar hanya membutuhkan penurunan sebesar 0,51% atau sebanyak

4.869 orang per tahun kalau menginginkan pada tahun 2006 terbebas dari buta huruf. Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia sebenarnya keinginan dari pemerintah kabupaten Blitar mencerdaskan penduduk tidak begitu sulit. Belajar dari pengalaman selama 5 tahun lalu (2001-2005) menurunkan penduduk buta huruf sebesar 0,51% per tahun tidak terlalu sulit. Misalnya pada tahun 2004 ke tahun 2005 mampu menurunkan penduduk buta huruf sebesar 2,63%.

Sementara itu, menurut data Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur tahun 2005 menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Blitar selama empat tahun terakhir (2002-2005) cenderung semakin bertambah membaik. Pada tahun 2002 angka IPM menunjukkan sebesar 66,48. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas manusia. Berbagai upaya yang dilakukan ternyata membuahkan hasil dengan meningkatnya angka IPM. Bahkan selama empat tahun terakhir (2002-2005) angka IPM tahun 2005 paling tinggi, yaitu sebesar 68,50. Dalam jangka waktu 20 tahun mendatang bukan tidak mungkin IPM kabupaten Blitar dapat menembus angka 78,00. Angka ini diperoleh dari angka rata-rata IPM selama 4 tahun (2002-2005). Kenaikan IPM dalam jangka waktu 4 tahun (2002-2005) sebesar 0,5. Dengan potensi sumber daya manusia yang belum berkembang maksimal ini, tentu sulit bagi Kabupaten Blitar untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan keterbelakangan. Rendahnya sumberdaya manusia ini sebagai akibat dari tidak sinergisnya pengembangan domain pendidikan yang meliputi domain kognitif (pengetahuan), psikomotorik (ketrampilan) dan afektif (nilai-nilai, sikap dan perilaku) sehingga masih banyak ditemui beberapa kasus perkuliahan pelajar, kasus narkoba, HIV/AIDS dan bahkan trafficking di masyarakat.

3. UMKM

Untuk masa 20 tahun ke depan, salah satu persoalan serius yang dapat menjadi ancaman, tetapi juga sekaligus peluang bagi Kabupaten Blitar adalah penetrasi industrialisasi. Pada saat isolasi geografis sudah makin terbuka dan industrialisasi mulai gencar masuk ke berbagai pelosok desa, maka sepanjang tidak dilakukan upaya yang serius untuk mempersiapkan sumber daya manusia lokal yang berkualitas, niscaya penduduk asli Kabupaten Blitar akan tertinggal oleh terjadinya akselerasi perubahan yang dahsyat, yang dihele industrialisasi.

Oleh sebab itu, kedepan persoalan-persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh industri kecil khususnya berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, rendahnya dukungan permodalan baik melalui perbankan maupun lembaga pendanaan lainnya, serta rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha industri kecil sudah dapat teratasi.

Selain itu pemerintah (daerah) harus mampu membuat regulasi berkaitan dengan proteksi terhadap pasar-pasar tradisional atas ekspansi pasar modern yang nyata-nyata memperlemah keberdayaan masyarakat kecil utamanya usaha kecil di daerah.

4. Pertanian

Di sektor pertanian, merupakan salah satu potensi yang sebetulnya cukup prospektif dikembangkan. Dalam PDRB ADHB pada tahun 2001 hingga 2004 sumbangannya sektor pertanian justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 PDRB Atas Harga Berlaku mencapai sebesar Rp 1.596.082,36 juta, tahun berikutnya meningkat menjadi Rp 1.799.233,33 juta, tahun 2003 mencapai sebesar Rp 2.007.364,50 juta dan tahun 2004 meningkat menjadi Rp 2.201.339,56 juta.

Tanaman bahan makanan yang cukup prospektif dikembangkan antara lain padi sawah, jagung, ketela pohon dan kedelai. Pada tahun 2004 produksi

tanaman padi kering mengalami penurunan sebesar 2,86% dibanding tahun 2004. Pada tahun 2004 produksi padi mencapai 257.853 ton, sementara pada tahun 2003 mencapai sebanyak 265.427 ton.

Produksi tanaman jagung mengalami gejala fluktuatif. Tetapi dibanding tahun 2000, produksi tahun 2004 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 produksi jagung sebanyak 190.006 ton, sementara pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 264.073 ton. Produktifitas jagung pada tahun 2003 sebesar 55,47 kw/ha, sementara pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi sebesar 62,63 kw/ha.

Di luar sektor perkebunan, salah satu potensi lain yang dimiliki Kabupaten Blitar adalah ternak. Komoditi peternakan terbesar di kabupaten Blitar adalah ayam ras petelur. Kendati ada wabah flu burung ternyata populasi jumlah ayam ras petelur dalam jangka waktu lima tahun (2001-2005) tidak mengalami penurunan. Tetapi sebaliknya jumlah ayam ras petelur justru mengalami kenaikan. Tahun 2001 jumlah ayam ras petelur sebanyak 8.105.726 ekor dan tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 14.180.000 ekor.

Selain ayam ras petelur, jumlah ayam buras secara statistik juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 jumlah ayam buras berjumlah 2.255.353 ekor. Sementara pada tahun 2005 meningkat menjadi sebanyak 2.345.107 ekor. Demikian juga populasi ayam ras pedagang dalam jangka waktu lima tahun terakhir tidak mengalami penurunan, sebaliknya mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 jumlah ayam ras pedaging sebanyak 633.000 ekor, sementara pada tahun 2004 meningkat menjadi 665.000 ekor. Terobosan yang terkait dengan peternakan ini telah mengantarkan kabupaten Blitar mendapat award dari Jawa Pos Pro Otonomi tahun 2006 dalam bidang terobosan dibidang perlindungan perekonomian

Saat ini, dua strategi utama yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mempercepat upaya pengentasan masyarakat miskin adalah: Pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui

peningkatan produktivitas, di mana masyarakat miskin yang memiliki kemampuan pengelolaan memperoleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Kedua, mengurangi kadar tekanan kemiskinan dan beban pengeluaran yang mesti ditanggung keluarga miskin melalui pengurangan beban kebutuhan dasar dan memperkuat penyangga ekonomi masyarakat miskin, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Apakah cara ini akan berhasil?

Terlepas, apa kendala dan bagaimana implementasi dari dua strategi di atas di lapangan, yang jelas adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat yang kuat untuk menanggulangi persoalan kemiskinan adalah salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Dalam satu tahun terakhir ini, paling-tidak upaya untuk melakukan koordinasi yang lebih rapi lewat perencanaan terpadu dan kesediaan untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan ke masyarakat adalah modal dasar yang strategis untuk mengembangkan langkah-langkah yang lebih terfokus. Di tingkat provinsi, kita tahu bahwa ada kemauan politik yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban penderitaan penduduk miskin yang didukung dana sangat besar.

Secara teoritis, peran yang semestinya dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain: melakukan identifikasi untuk menggali potensi daerah, memetakan dan berusaha memahami permasalahan substansial dari persoalan kemiskinan, dan menemukan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ciri-ciri dan karakteristik sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini pelibatan seluruh *stakeholders* daerah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, pihak swasta di daerah, lembaga keuangan daerah dan tokoh-

tokoh masyarakat di daerah mutlak diperlukan. Apakah hal ini bisa dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar?

Bagi Kabupaten Blitar, upaya dan keinginan untuk mewujudkan visi membangun perekonomian rakyat yang tangguh, mandiri dan meminimalisir angka kemiskinan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar peluang yang ada dapat termanfaatkan dengan baik, dan sekaligus menyiapkan diri agar berbagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian visi itu dapat dieliminasi dan dipecahkan.

Dalam periode dua puluh tahun ke depan, diprediksi kondisi masyarakat Kabupaten Blitar secara bertahap akan lebih sejahtera, maju, mandiri dan lebih religius. Apakah prediksi ini terbukti benar atau keliru, sudah barang tentu ditentukan oleh kesiapan masyarakat sendiri, dan seberapa jauh komitmen Pemerintah Daerah terhadap nasib rakyat secara nyata.

C. MODAL DASAR

Kabupaten Blitar memiliki modal dasar yang melimpah. Modal dasar tersebut secara garis besar meliputi kondisi sosial budaya masyarakat yang religius, semangat bekerja keras, hubungan horisontal masyarakat yang rukun dan damai serta kondisi alam yang memiliki potensi untuk dikembangkan seperti pertambangan, pertanian, pariwisata dan industri.

Modal dasar tersebut merupakan modal dasar pembangunan yang masih merupakan potensi sehingga perlu digali dan dikembangkan agar dapat menjadi kekuatan yang dapat menopang pembangunan.

Secara geografis wilayah kabupaten Blitar dapat menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan yang memberikan peluang serta ancaman bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang tanpa kecuali. Apapun kebijakan pembangunan yang dipilih tidak dapat melepaskan diri dari kondisi wilayah dan masyarakat di dalamnya.

Apa yang ada di wilayah Kabupaten Blitar seperti kekayaan alam dan keanekaragaman hayati baik yang ada di darat, laut dan udara dapat didayagunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Semua kekayaan alam bukan didayagunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Tetapi semua kekayaan alam yang ada dan dimiliki Kabupaten Blitar harus dapat didayagunakan secara bertanggungjawab untuk kepentingan rakyat.

Sumber daya berupa penduduk adalah modal dasar yang sangat penting. Penduduk inilah yang merupakan sumber daya produktif bagi bergeraknya pembangunan di manapun termasuk di Kabupaten Blitar. Jumlah penduduk yang diikuti dengan kualitas yang memadai akan semakin memungkinkan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan untuk memakmurkan rakyatnya.

Otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola pembangunan merupakan modal dasar yang sangat penting terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi. Di bidang politik pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada pusat untuk menentukan kepala daerahnya. Tetapi masyarakat di daerah secara mandiri dapat menentukan pemimpinnya sendiri. Secara ekonomi pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber yang ada di daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2005-2025

A. VISI

TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, MAKMUR, DAN RELIGIUS.

Bagi Kabupaten Blitar, telah disepakati bahwa penyangga sosial bagi tumbuhnya kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat adalah terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat berarti perekonomian yang berkembang dan dikembangkan berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Adapun muara dari pengembangan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Blitar adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara materiil dan imaterial. Secara material adalah dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat secara baik, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat sedangkan secara imateriil adalah semakin meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang tercermin dalam perilaku sehari-hari yang diwarnai nilai-nilai keagamaan.

B. MISI

Dalam rangka mengakomodasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, maka untuk menjamin adanya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, secara garis besar telah ditetapkan tujuan jangka panjang pembangunan, yakni untuk mencapai Kabupaten Blitar yang maju, mandiri dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar serta sesuai dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur, secara garis besar, Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2006-2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Blitar tahun 2005–2025 adalah mewujudkan perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera, makmur, berdaya dan religius dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera, makmur, berdaya dan religius dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;

1.1. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, dan wilayah bencana

1.2. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung

disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat

- 1.3. Program Pengembangan Asuransi dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin, diarahkan bukan hanya pada program-program bantuan yang bersifat karikatif, tetapi juga pada bentuk bantuan yang dapat berfungsi sebagai asuransi dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan. Yang dimaksud asuransi sosial disini adalah program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan warga masyarakat miskin dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekedar program darurat yang bersifat karikatif dan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Upaya pengembangan program pengembangan asuransi dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ini akan ditempuh dengan cara: (a) peningkatan efektifitas pelaksanaan program asuransi sosial bagi keluarga miskin, dan (b) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap berbagai asset dan sumberdaya yang tersedia, seperti jaringan sosial, modal, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- 1.4. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan

otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

- 1.5. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memerhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Selain itu Sistem administrasi kependudukan harus mampu mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. Secara nyata, ketersediaan data administrasi kependudukan yang baik dan memadai akan sangat memudahkan pemerintah untuk menetapkan sasaran program pembangunan.
- 1.6. Berbasis Pada Komunitas Lokal, diarahkan untuk mendorong upaya pemberdayaan dan pengembangan dukungan serta potensi-potensi yang ada di tingkat komunitas (*community support system*). Upaya pengembangan program berbasis pada komunitas lokal dan nilai-nilai keagamaan ditempuh dengan cara: (a) pelibatan masyarakat dan lembaga-lembaga lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan, (b) pelibatan dan pengembangan dukungan kelompok-kelompok sekunder dan pranata sosial di masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, dan (c) kepekaan dan kinerja aparat birokrasi yang berkompeten dan transparan.

- 1.7. Pemberdayaan Kontrol dan Prakarsa Lokal, diarahkan untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya berbagai bias dan bentuk penyelewengan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Upaya pemberdayaan kontrol dan prakarsa lokal ditempuh dengan cara: (a) sosialisasi dan transparansi informasi tentang informasi alokasi dana dan rincian program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan, dan (b) pembentukan tim verifikasi di tiap-tiap komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat —termasuk LSM dan ulama— yang bertugas untuk memberikan keputusan terakhir dalam penentuan kelompok sasaran program, sekaligus berperan sebagai kelompok kontrol terhadap pelaksanaan program di luar mekanisme kelembagaan yang sudah ada.
- 1.8. Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, diarahkan untuk mendukung peningkatan daya jangkauan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dasar. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatan pelayanan kesehatan berkelanjutan (*sustainable*) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan, (b) pengembangan perilaku hidup sehat masyarakat, (c) peningkatan kualitas gizi masyarakat, (d) peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan, (e) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, (f) peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan,

(g) pengembangan sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan.

1.9. Kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global, diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan daya saing sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Blitar, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Upaya untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang mumpuni diwujudkan melalui cara: (a) perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh dunia industri dan jasa, terutama bagi TKI/TKW dan (b) penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global, dan (c) perlindungan hak-hak hukum dan pemberian fasilitas pelayanan khusus bagi TKI/TKW.

1.10. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, diarahkan untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan kualitas keluarga yang berbahagia dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, (b) penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kabupaten, (c) penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, dan (d) peningkatan peran pemerintah kabupaten

dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.

- 1.11. Partisipasi masyarakat di segala bidang, diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini dilakukan dengan cara: (a) peningkatan kualitas pelayanan media informasi dengan mempublikasikan program-program pembangunan di Kabupaten Blitar dalam media cetak dan elektronik (diantaranya melalui www.blitarkab.go.id) sehingga mudah diakses seluruh masyarakat; (b) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga kabupaten sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman, dan (c) pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (*learning and critical society*).
2. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
 - 2.1 Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.
 - 2.2 Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia

dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang secara kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan) mampu menguasai perkembangan teknologi dan secara afektif (nilai dan perilaku) memiliki moralitas, akhlak dan budi pekerti yang luhur.

- 2.3 Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor.

Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memerhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blitar telah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan yang baik dengan membangun dan merehabilitasi pusat-pusat layanan kesehatan diantaranya rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan polindes yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

- 2.4 Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar diarahkan untuk mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat dengan membuka akses daerah-daerah terisolasi/terpencil dan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan mobilitas orang, barang dan modal. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang dapat mendorong daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
 - 3.1. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri. Seiring dengan perkembangan global yang resisten bagi UMKK yang masih lemah secara sumber daya dan permodalan sehingga diperlukan regulasi-regulasi untuk memproteksi UMKK agar tetap dapat eksis dan berkembang.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui

pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

- 3.2. Peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.
- 3.3. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang adil sehingga pekerja mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuan kompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.
- 3.4. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka

penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

- 3.5. Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasaran serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Peningkatan itu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.
- 3.6. Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
- 3.7. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan

diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (nonpertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan

- 3.8. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
- 3.9. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 3.10. Koperasi didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan

rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat.

- 3.11. Peranan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menciptakan iklim yang kondusif dan menjaga keberlanjutan perekonomian kabupaten. Peningkatan terhadap peranan pemerintah kabupaten dilakukan dengan cara: (a) pengembangan kerangka regulasi non diskriminatif tata perekonomian kabupaten, (b) peningkatan iklim usaha menjamin keberlanjutan perekonomian kabupaten, (c) pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah-daerah penyangga, (d) memfasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal, dan (e) peningkatan aktivasi pemasaran dan angka konsumsi berbagai produk masyarakat di kabupaten Blitar. f). Secara proaktif menarik investor dari luar Kabupaten Blitar.
- 3.12. Peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya daerah, diarahkan untuk menumbuhkan harmonisasi keterkaitan berbagi sektor ekonomi dan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya kesenjangan dan eksploitasi antar sektor. Upaya untuk mewujudkan hal ini dilakukan dengan cara: (a) penataan sektor formal dan informal yang memperhatikan harmonisasi *setting social*, pranata sosial, kultural, estetika, dan lingkungan, (b) peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif, dan (c) peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku.
- 3.13. Pengembangan Kekuatan ekonomi lokal, diarahkan untuk menumbuhkan potensi dan keberdayaan kekuatan ekonomi

masyarakat lokal, khususnya UKM. Upaya untuk mewujudkan kekuatan ekonomi lokal yang benar-benar berdaya dikembangkan dengan cara: (a) pengembangan kawasan industri peternakan (KINAK), terutama ayam ras/buras, sapi perah dan sapi potong, (b) peningkatan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat, (b) pengembangan sarana dan prasarana publik sosial dan ekonomi daerah yang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan (d) pengembangan etos pelayanan di bidang jasa.

- 3.14. Produktifitas dan inovasi, diarahkan untuk memacu peningkatan produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi di Kabupaten Blitar. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan cara: (a) peningkatan kapasitas warga kabupaten dalam pengelolaan sumber daya produktif dan penguasaan teknologi, (b) pengembangan diversifikasi produk layanan jasa, (c) penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sector jasa, dan (d) peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan.
- 3.15. Stabilitas dan Kemandirian Keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang stabil dan dapat fungsional mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan melalui cara: (a) pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, (b) revitalisasi sektor jasa keuangan, (c) peningkatan kemampuan fiskal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, dan (d) peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak, (e) peningkatan tabungan pemerintah

daerah dalam bentuk dana cadangan, (f) adanya kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan. g). meningkatkan penghematan terhadap penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

- 3.16. Pengembangan pariwisata, diarahkan untuk mewujudkan pembangunan industri wisata yang berbasis pada potensi wilayah dan berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal. Upaya untuk mewujudkan ini dapat dilakukan dengan cara: (a) mengembangkan potensi wisata lokal, khususnya asset cagar budaya dan sejarah, (b) memfasilitasi pengembangan industri kecil disektor kepariwisataan yang ditekuni penduduk lokal. c) pengembangan pariwisata yang berbasis agro (agrowisata).
- 3.17. Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten, diarahkan untuk menjamin proses perumusan dan penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kabupaten yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan publik, dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara: (a) pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten secara terpadu, (b) pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten secara partisipatif, (c) pengembangan sistem sosialisasi publik rencana pembangunan infrastruktur kabupaten yang aksesibel, dan (d) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur kabupaten.
- 3.18. Kualitas dan kuantitas air bersih, diarahkan untuk menjamin tersedia dan terpeliharanya kualitas dan kuantitas air bersih bagi penduduk Kabupaten Blitar secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan kualitas dan ketersediaan air bersih yang memadai,

akan dikembangkan dengan cara: (a) pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, (b) penurunan tingkat intrusi air laut ke dalam air tanah, dan (c) penurunan tingkat polusi ke dalam sumber-sumber air bersih. (d) meningkatnya kualitas dan kuantitas hutan sebagai penyangga kelestarian sumber-sumber air dengan perlindungan dan penanaman kembali (reboisasi).

3.19. Sistem transportasi, diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang menjamin rasa aman, selamat, andal dan nyaman serta terjangkau bagi pengguna jalan raya. Untuk mewujudkan hal ini akan dikembangkan dengan cara: (a) peningkatan mutu manajemen transportasi, (b) peningkatan kesaling-terhubungan antar seluruh wilayah kabupaten yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; (c) pengendalian kelaikan transportasi, khususnya angkutan umum, barang dan orang dalam wilayah kabupaten; dan (d) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi dan infrastruktur, serta (e) pepaduserasian program pusat dan daerah dibidang pembangunan sistem transportasi wilayah.

3.20. Perumahan dan permukiman, diarahkan untuk menjamin tersedianya perumahan dan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat akan dikembangkan dengan cara: (a) pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana pemukiman, (b) pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan didukung oleh prasarana-sarana publik yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara professional, mandiri, dan efisien, dan (c)

- pengembangan perumahan dan prasarana-sarana pemukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 3.21. Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kabupaten, diarahkan untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur sesuai standar yang ditetapkan dengan cara: (a) meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan, dan (b) meningkatkan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.
- 3.22. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS), diarahkan untuk memperlancar kepentingan mobilitas sosial masyarakat dan kelancaran pengembangan dunia usaha. Untuk mewujudkan hal ini akan dilakukan dengan cara mendukung percepatan realisasi program pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat.
- 4.1. Pembangunan agama diarahkan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- 4.2. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
- 4.3. Pembangunan agama diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok

masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM;
 - 5.1. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparat beserta institusi terkait dengan masalah keamanan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat
 - 5.2. Pembangunan hukum diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global
 - 5.3. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat

luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik.

- 5.4. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga negara yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan
- 5.5. Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship*), diarahkan untuk mengembangkan hak, kewajiban dan etika serta kedewasaan sikap politik masyarakat. Upaya menumbuhkan pendidikan kewarganegaraan ini akan ditempuh dengan cara: (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrument serta media pembelajaran bagi kehidupan berdemokrasi, (b) pengembangan berbagai saluran komunikasi politik bagi masyarakat, (c) memfasilitasi pengembangan berbagai wadah dan organisasi sosial-politik yang sehat dan berkeadilan, dan (d) penyelenggaraan pendidikan politik kenegaraan, antara lain penanaman nilai-nilai Pancasila, Kewaspadaan kebangsaan, ketahanan nasional kepada masyarakat serta kerjasama teritorial untuk menjaga keutuhan NKRI. (e) peningkatan upaya

pendidikan politik bagi semua pelaku politik termasuk partai politik.

- 5.6. Kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik, diarahkan untuk mengembangkan peningkatan kualitas dan kinerja berbagai lembaga layanan publik. Upaya untuk membangun mekanisme pengawasan kinerja badan publik ini akan dilakukan dengan cara: (a) penyediaan mekanisme dan saluran bagi upaya pengawasan kinerja badan-badan publik, dan (b) peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN).
- 5.7. Peningkatan efektivitas lembaga pemerintahan kabupaten, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan, diarahkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja lembaga pemerintahan dan perangkat daerah serta organisasi sosial-politik di Kabupaten Blitar. Upaya peningkatan efektivitas kinerja lembaga pemerintah kabupaten dan organisasi sosial-politik ini dilakukan dengan cara: (a) Membuka berbagai saluran dan forum yang memungkinkan makin terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang berhubungan dengan kepentingan hajat hidup masyarakat, dan (b) pengembangan hubungan kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislative, serta *stakeholders* terkait.
- 5.8. Pengembangan budaya politik yang sehat, diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kehidupan berdemokrasi yang benar-benar sehat. Upaya pengembangan budaya politik yang sehat ini dikembangkan dengan cara: (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (*egalitarianism*), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan, dan

orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; dan (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan modal sosial berbagai wacana dan media.

- 5.9. Penyediaan media komunikasi politik, diarahkan untuk mewujudkan media komunikasi politik yang transparan antara masyarakat dan pemerintah. Upaya penyediaan media komunikasi politik yang transparan ini dilakukan dengan cara:
(a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (a) perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa yang independen; dan (c) penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;
 - 6.1. Kebijakan lingkungan hidup, diarahkan untuk menjamin adanya sinergi dan konsistensi antar berbagai kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kerjasama rakyat dan antar komponen masyarakat kabupaten Blitar untuk menjamin dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan, (b) pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang disertai peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat

nasional dan daerah, dan (c) dukungan program dan anggaran yang memadai untuk menjamin kebutuhan fasilitas mendapatkan kualitas dan kuantitas air minum dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

- 6.2. Kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan responsibilitas lembaga pengelola lingkungan hidup. Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga ini dilakukan dengan cara: (a) menetapkan prosedur standar penanggulangan pencemaran lingkungan dan bencana, (b) peningkatan penyebaran data dan informasi lingkungan (informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana), dan (c) Koordinasi dan sinergi antarlembaga, masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 6.3. Kontrol sosial, diarahkan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk dan pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blitar. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Pembangunan Ruang hutan terbuka dan taman kota, (b) Pembangunan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup sejak dini, (c) Menciptakan lingkungan kabupaten yang bersih, indah dan teduh, (d) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam memantau kualitas lingkungan hidup, dan (e) konsistensi penegakan hukum bagi pelanggaran pencemaran lingkungan.
- 6.4. Rehabilitasi dan konservasi, diarahkan untuk memulihkan dan menjaga kelestarian hutan agar dapat dieliminasi kemungkinan terjadi bencana alam atau banjir yang timbul karena kerusakan lingkungan alam. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) menjaga kelestarian hutan, (b)

menindak dengan tegas pelaku perusakan hutan, dan (c) mewajibkan upaya rehabilitasi dan konservasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksploitasi sumber daya alam hutan.

- a) Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat
- b) Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
- c) Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa

lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

- d) Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.
- e) Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

6.5. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan

berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang

- 6.6. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 6.7. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin

7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN
 - 7.1. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - 7.2. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangan seai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
 - 7.3. Kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Blitar, diarahkan untuk mengembangkan kinerja aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan berorientasi pada kepentingan publik. Upaya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang optimal dapat ditingkatkan dengan cara: (a) pengembangan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan, (b) peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) rekrutmen aparatur pemerintahan yang terbuka, jujur, dan bebas KKN, dan (d) perekrutmen kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Blitar secara simultan dan integratif. (e) terlaksananya pengawasan yang dilakukan lembaga internal secara efektif dan independent.

- 7.4. Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diarahkan untuk mengembangkan struktur kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat ditempuh melalui cara: (a) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga, dan (b) peningkatan kualitas layanan dan fungsionalisasi aparatur pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik.
- 7.5. Pemindahan pusat pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pemerintah daerah. Upaya untuk mewujudkan hal ini akan ditempuh melalui cara: (a) mengkaji dan menjajagi wilayah potensial yang layak menjadi pusat pemerintahan baru, dan (b) memfasilitasi pengembangan wilayah yang mendukung pertumbuhan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 7.6. *Good Governance* dan *Clean Government*, diarahkan untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar otonom, transparan, memiliki akuntabilitas yang teruji, dan profesional. Upaya untuk membangun dan mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* ini dilakukan dengan cara: (a) pengedepanan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, (b) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan, dan (c) peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses dan kegiatan pembangunan secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

- 7.7. Kapasitas penyelenggara pemerintah daerah, diarahkan untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Blitar. Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggara pemerintah daerah dilakukan melalui cara: (a) peningkatan kapasitas atau kompetensi aparat pemerintah daerah dan (b) peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- 7.8. Kualitas pelayanan publik, diarahkan untuk mewujudkan kinerja lembaga dan aparatur birokrasi yang berorientasi pada kepentingan public sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan cara: (a) penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah agar dapat berfungsi secara memadai, ramping luwes dan responsif, (b) peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan jajaran, (c) penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, (d) optimalisasi fungsi dan peran dinas dan lembaga terkait dalam memberikan layanan kepada publik, dan (e) intensifikasi dan ekstensifikasi layanan publik.
- 7.9. Otonomi daerah dan desentralisasi, diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan kepekaan daerah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara kontekstual. Upaya untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Mengembangkan perencanaan program pembangunan secara *bottom-up*, dan (b) mengembangkan

potensi dan modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

- 7.10. **Kemitraan antar daerah**, diarahkan untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antardaerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan berbagai masalah yang melewati batas-batas administrasi daerah. Pembangunan kerjasama antardarah melalui sistem jejaring antardarah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dan kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proposional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerjasama antardaerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensi Kabupaten Blitar. Untuk mewujudkan hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antardaerah untuk memecahkan masalah bersama baik secara vertical maupun horisontal, dan (b) pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- 7.11. Sinergi antar-*stakeholders*, diarahkan untuk memfasilitasi dan menggali peran *stakeholders* dalam mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Blitar. Upaya untuk membangun sinergi antar *stakeholders* ini dilakukan dengan cara: (a) peningkatan keseimbangan dan peran antartiga pelaku pembangunan: publik, swasta, komunitas, dan pemerintah daerah, dan (b) Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pembangunan.

B. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dikemukakan di depan, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1. RPJM ke-1 (2005 - 2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan :

- 1). Menata kembali dan membangun Kabupaten Blitar di segala bidang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang pertanian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Bersamaan dengan itu dilaksanakan revitalisasi kelembagaan pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki lokasi strategis, antara lain kawasan sentra industri berbasis sentra agribisnis.

- 2). Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- 3). Peningkatan kegiatan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kabupaten Blitar. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.
- 4). Dibidang Keamanan dan ketertiban ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui tertanganinya berbagai kerawanan, serta meningkatnya keamanan termasuk keamanan sosial. Kondisi itu didukung oleh berkembangnya nilai baru yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan dalam rangka memantapkan budaya nasional, menguat dan meluasnya pemahaman tentang identitas nasional; dan meningkatnya

pelestarian serta pengembangan kekayaan budaya untuk memperkuat kedaulatan NKRI berlandaskan falsafah Pancasila.

- 5). Di bidang penegakan hukum ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi; meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6). Kualitas pelayanan masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

2. RPJM ke-2 (2011 - 2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan pada :

- 1). Memantapkan penataan kembali Kabupaten Blitar di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
- 2). Di Bidang Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blitar terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bekerjasama dengan aparat keamanan.
Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai

dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

- 3). Peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- 4). Meningkatnya daya saing perekonomian melalui penguatan sentra-sentra industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman.
- 5). Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan

kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

3. RPJM ke-3 (2016 - 2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan pada :

- 1). Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
- 2). Sejalan dengan keamanan dan ketertiban yang makin mantap yang ditandai dengan peningkatan profesionalisme aparat keamanan yang didukung partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap ketertiban dan keamanan di lingkungannya. Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum

dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara makin mampu mendukung pembangunan nasional.

- 3). Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.
- 4). Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.
- 5). Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

6). Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi sebagai bagian dari masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

4. RPJM ke-4 (2021 - 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan pada :

- 1). Upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
- 2). Kelembagaan politik dan hukum telah terbentuk ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Kondisi itu didukung oleh terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan

hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

- 3). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Kabupaten Blitar diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral terbentuk watak dan perilaku manusia yang paripurna dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4). Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan

itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

- 5). Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP: PRASYARAT DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAMIN EFEKTIVITAS RPJPD KABUPATEN BLITAR 2005-2025

Komitmen untuk membangun perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya sesungguhnya adalah proses pembangunan jangka panjang yang disepakati akan dapat tercapai pada tahun 2025. Sudah barang tentu untuk merealisasikan visi ideal ini, dibutuhkan tanggungjawab, dukungan, komitmen, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan jajaran birokrasi dalam satu rangkaian pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang sinergis satu dengan yang lain, sehingga dapat dihasilkan keterpaduan dan daya ungkit, serta dapat diwujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Disadari bahwa pelaksanaan semua kegiatan pembangunan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget frame*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram maupun dalam satu dinas dan antardinas, dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar, fungsi RPJPD adalah sebagai pemandu dan sekaligus rambu-rambu. Dengan kata lain, RPJPD

Kabupaten Blitar 2005-2025 yang telah berhasil disusun ini bukan saja berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga sekaligus sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan berbagai program pembangunan Kepala Daerah dan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

A. KAIDAH DAN DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN

RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar ini pada dasarnya merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan 20 tahun ke depan. Di samping itu, RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ini juga merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Bupati Kabupaten Blitar berkewajiban menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Blitar yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerjsa Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Satuan Kerja pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Bupati, Sekretaris Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah daerah Kabupaten Blitar, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Blitar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Blitar.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar untuk mewujudkan perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh, menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya, oleh sebab itu perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan pemerintah daerah yang kuat dan demokratis, (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (3) keberpihakan kepada rakyat yang benar-benar nyata, dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif dan konstruktif.

B. PRASYARAT

Dalam menyusun rencana, melaksanakan dan menjamin efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Blitar agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025, tiga pilar *Good Governance* yang mutlak dibutuhkan sebagai prasyarat keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar adalah: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dan seluruh *stakeholders*.

Yang dimaksud transparansi di sini adalah adanya jaminan dan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi pembangunan yang direncanakan, tengah dilaksanakan maupun yang sudah

dilaksanakan di masyarakat. Transparansi bukan saja menuntut adanya obyektivitas, keterbukaan dan kejujuran, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya sikap menerima berbagai kritik konstruktif dari masyarakat sebagai umpan balik untuk terus-menerus memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, sistem birokrasi, kualitas layanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kapasitas berbagai lembaga atau instansi pemerintah daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai tahap perencanaan, implementasi, sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standart yang telah ditetapkan.

Akutabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan dan legitimasinya di mata rakyat.

Sementara itu, yang dimaksud partisipasi adalah perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran baru masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekadar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek pembangunan belaka, melainkan merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang setral, strategis dan penting.

Tiga pilar *Good Governance* sebagaimana dikemukakan di atas, adalah “spirit” yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh pemangku-kepentingan dan *stakeholders* terkait untuk menjamin berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar berjalan seperti yang diharapkan, yakni mewujudkan: **TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN RAKYAT YANG MANDIRI, TANGGUH DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, MAKMUR DAN RELIGIUS.**